

BAB IV

ANALISIS ISI REGULASI PENANGANAN MIGRASI ILEGAL DI MALAYSIA

Pada beberapa dekade terakhir para peneliti mengembangkan analisis isi sebagai sebuah varian dalam penelitian bersamaan dengan perkembangan metode penelitian lapangan (*field research*). Analisis isi lebih mengunggulkan penelusuran teks dari sekedar kajian teori dan metodologi dan sekaligus memanfaatkan sumber kepustakaan tersebut menjadi bahan studinya. Menurut Neundorf (2002), analisis isi adalah merangkum, pesan dari analisis kuantitatif yang menggunakan metode saintifik dan tidak terbatas pada tipe variabel-variabel yang mungkin diukur atau sesuatu yang dimana pesan itu dibuat atau ditunjukkan. Riffe, Lacy & Fico (2005) memberikan definisi lain dari analisis isi, yaitu pengujian yang terstrukturisasi dan dapat ditiru dari simbol-simbol komunikasi, dimana simbol ini diberikan jumlah nilai yang bersifat numerik berdasarkan pengukuran yang valid dan sah, dan juga analisis menggunakan metode statistik untuk menggambarkan isi komunikasi, mengambil kesimpulan dan memberikan isi konteks, baik produksi ataupun konsumsi.

Jenis analisis isi yang akan dipakai di dalam penelitian ini adalah analisis isi kuantitatif. Analisis isi kuantitatif menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Maka tidak terlalu mementingkan kedalaman data atau analisis. Peneliti lebih mementingkan aspek keluasan data sehingga data atau hasil penelitian dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi. Maka secara umum analisis isi kuantitatif adalah teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis komunikasi yang tampak (*manifest*), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel dan dapat direplikasi. Karena peneliti harus menjaga

sifat objektif dan valid maka dalam analisis data, peneliti tidak boleh mengikutsertakan analisis dan interpretasi yang bersifat subjektif sehingga hasil analisis benar-benar objektif dan bila dilakukan penelitian oleh peneliti lainnya, hasilnya relatif sama atau tidak jauh berbeda (Riffe, Lacy, & Fico, 2005).

Untuk melaksanakan analisis isi terhadap regulasi penanganan imigran ilegal di Malaysia, maka hal pertama yang harus ditentukan dulu adalah indikatornya. Lima indikator yang akan digunakan yaitu Aktor, Otoritas, Tata Kelola, Sumber Anggaran dan Output. Masing-masing dari kelima indikator itu kemudian akan memiliki kata kunci yang akan dibagi masing-masing kedalam klasifikasi pendekatan realisme, liberalisme atau konstruktivisme, sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam Tabel BAB I.

Sejumlah *sign* yang ditentukan di atas kemudian diverifikasi keberadaannya dalam 7 dokumen regulasi tentang penanganan ilegal Migrasi di Malaysia, yang kemudian akan dihitung frekuensi munculnya kata atau frasa di dalam dokumen tersebut. Langkah berikutnya kemudian disusun menjadi tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan metode statistik deskriptif, untuk diketahui seberapa sering atau artikulatif suatu pesan tentang Pendekatan realisme, liberalisme dan konstruktivisme dalam dokumen-dokumen tersebut. Di dalam tabel tersebut tidak disebutkan mengenai klasifikasi *sign words*, tetapi dijelaskan di dalam bagian eksplanasi tabel. Tujuan klasifikasi ini adalah untuk menyederhanakan pendekatan dengan *sign words* yang kompleks, sehingga penelitian bisa lebih mudah untuk digeneralisir dan lebih objektif, dengan catatan tidak semua pendekatan memiliki klasifikasi.

A. Analisis Indikator Aktor Dalam Manajemen Kebijakan Penanganan Migrasi Ilegal

Indikator pertama yang akan dianalisis adalah indikator aktor dalam manajemen kebijakan penanganan migrasi ilegal. Indikator aktor mewakili subjek atau pihak-pihak yang mengatur tentang urusan penanganan imigran

ilegal, baik itu dalam hal perumusan kebijakan, penjatuan hukuman, pengidentifikasian, penangkapan, pengadilan, pemulangan, seluruh pihak-pihak yang secara tidak langsung berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan di level pemerintah Federal dan negara bagian, aktor non-negara dan yang terakhir keterlibatan pihak-pihak internasional dalam proses perumusan regulasi dan di lapangan. Dengan kata lain, indikator aktor akan menentukan siapa *stakeholder* yang paling berpengaruh dalam kebijakan penanganan imigran ilegal di Malaysia secara keregulasian. Indikator aktor tersebut kemudian pecah menjadi 3 pendekatan besar yaitu, realisme, liberalisme dan konstruktivisme untuk ditentukan pendekatan mana yang paling dominan dalam indikator aktor. Berikut dibawah ini merupakan hasil analisis tabel distribusi frekuensinya.

Tabel 4.1 Hasil analisis isi indikator aktor dalam manajemen kebijakan penanganan migrasi ilegal

Pendekatan	No.	Diksi kata	Frekuensi (%)						
			Act 155	Act 150	Act 670	Immigration Regulations 1963	Immigration Detention Regulations 2003	Act 537	Act 796
REALI SME	1.	Air Force	1 (0.16 %)	0	0	0	0	0	0
	2.	Commissioner General	0	0	0	0	0	72 (20.16 %)	0
	3.	Controller	0	0	0	91 (34.33%)	0	0	0
	4.	Council for Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants	0	0	4 (1.47%)	0	0	0	0
	5.	Country	14 (2.25 %)	0	48 (17.71%)	1 (0.37%)	1 (1.12%)	1 (0.28 %)	2 (4.44%)

6.	Court in Sabah	1 (0.16 %)	0	0	0	0	0	0
7.	Court in Sarawak	0	0	0	0	0	0	0
8.	Customs Officer	3 (0.48 %)	19 (17.27%)	2 (0.73%)	0	0	0	0
9.	Dental Officer	0	0	0	0	0	15 (4.20 %)	0
10.	Director General	107 (17.25 %)	18 (16.36%)	7 (2.58%)	7 (2.64%)	8 (8.98%)	2 (0.56 %)	27 (60 %)
11.	Director of Immigration	4 (0.64 %)	2 (1.81%)	0	0	0	0	0
12.	East Malaysian State	71 (11.45 %)	0	0	0	0	0	0
13.	Enforcement Officer	0	0	51 (18.81%)	0	0	0	0
14.	Federal Court	1 (0.16 %)	0	0	0	0	1 (0.28 %)	0

15.	Federal Government	4 (0.64%)	0	0	0	0	0	1 (2.22%)
16.	Government of Malaysia	0	0	0	0	0	0	0
17.	Government of the State	1 (0.16%)	0	0	0	0	0	0
18.	High Level Committee	0	0	8 (2.95%)	0	0	0	0
19.	Immigration Officer	97 (15.64%)	22 (20%)	6 (2.21%)	8 (3.01%)	5 (5.61%)	0	0
20.	Judicial Officer	2 (0.32%)	0	2 (0.73%)	0	0	0	0
21.	Labour Officer	0	0	2 (0.73%)	0	0	0	0
22.	Magistrate	16 (2.58%)	5 (4.54%)	30 (11.07%)	1 (0.37%)	0	3 (0.84%)	0
23.	Medical Officer	2 (0.32%)	0	7 (2.58%)	0	15 (16.85%)	26 (7.28%)	0

24.	Military	1 (0.16 %)	0	0	0	0	1 (0.28 %)	0
25.	Minister	33 (5.32 %)	5 (4.5 4%)	33 (12. 17%))	17 (6.41%)	5 (5.61%)	35 (9.80 %)	6 (13. 33%))
26.	Ministry	0	0	7 (2.5 8%)	0	1 (1.12%)	2 (0.56 %)	0
27.	Naval	1 (0.16 %)	0	0	0	0	0	0
28.	Parole Officer	0	0	0	0	0	24 (6.72 %)	0
29.	Peninsular Malaysia	10 (1.61 %)	5 (4.5 4%)	1 (0.3 6%)	9 (3.39%)	0	2 (0.56 %)	0
30.	Police	19 (3.06 %)	19 (17. 27%))	2 (0.7 3%)	0	1 (1.12%)	17 (4.76 %)	0
31.	Port Officer	4 (0.64 %)	0	0	0	0	0	0
32.	Protection Officer	0	0	21 (7.7 4%)	0	0	0	0

33.	Prison Officer	0	0	0	0	0	63 (17.64 %)	0
34.	Public Prosecutor	2 (0.32 %)	1 (0.90 %)	3 (1.10 %)	0	0	0	0
35	Officer in charge	0	0	0	0	49 (55.05%)	51 (14.28 %)	
36.	Sabah	24 (3.87 %)	4 (3.63 %)	3 (1.10 %)	53 (20%)	1 (1.12%)	5 (1.40 %%)	0
37.	Sarawak	22 (3.54 %)	4 (3.63 %)	3 (1.10 %)	48 (18.11%)	1 (1.12%)	6 (1.68 %)	0
38.	Secretary General of the Ministry	0	0	6 (2.76%)	0	0	0	0
39.	Seizing Officer	1 (0.16 %)	1 (0.90 %)	0	0	0	0	0
40.	Session Court Judge	0	0	0	0	0	0	0
41.	Social Welfare Officers	0	0	1 (0.36%)	0	0	0	0
42.	State	91 (14.67 %)	0	2 (0.73%)	9 (3.39%)	1 (1.12%)	8 (2.24 %)	1 (2.22%)

	43.	Judiciary	0	0	0	0	0	0	0
	44.	the Government	12 (1.93 %)	5 (4.5 4%)	8 (2.9 5%)	5 (1.88%)	0	8 (2.24 %)	0
	45.	the State	48 (7.74 %)	0	0	10 (3.77%)	1 (1.12%)	4 (1.12 %)	0
	47.	Subordinate Courts	5 (0.80 %)	0	0	0	0	1 (0.28 %)	0
TOTAL			597 (96.44 %)	110 (100 %)	257 (94. 83 %)	259 (98.10%)	89 (100%)	347 (97.19 %)	37 (82. 22 %)
LIBER ALISM E	1.	Corporation	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Company	4 (0.64 %)	0	0	3 (1.18%)	0	0	0
	3.	Corporate	11 (1.77 %)	0	7 (2.5 8%)	0	0	0	0
	4.	Individual	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			15 (2.42 %)	0	7 (2.5 8%)	3 (1.18%)	0	0	0
KONST RUKT VISME	1.	Consular Officer	3 (0.48 %)	0	2 (0.7 3%)	0	0	0	0

2.	Consular Representative	0	0	0	0	0	0	0
3.	Convention	3 (0.48%)	0	0	0	0	0	6 (13.33%)
4.	Foreign Country	1 (0.16%)	0	2 (0.73%)	0	0	0	0
5.	Foreign Jurisdiction	0	0	0	0	0	0	0
6.	Foreign State	0	0	0	0	0	10 (2.80%)	0
7.	International Code	0	0	0	1 (0.37%)	0	0	0
8.	International Governmental Organization	0	0	0	0	0	0	0
9.	International Treaty	0	0	0	0	0	0	0
10.	International Non-Governmental	0	0	0	0	0	0	0

		Organizatio n							
	11.	Organizatio n	0	0	0	1 (0.37%)	0	0	2 (4.4 4%)
	12.	Non- Government al Organizatio n	0	0	1 (0.3 6%)	0	0	0	0
	13.	Relevant Organizatio ns	0	0	2 (0.7 3%)	0	0	0	0
TOTAL			7 (1.13 %)	0	7 (2.5 8%)	2 (0.75%)	0	10 (2.80 %)	8 (17. 77 %)
TOTAL			619 (100 %)	110 (100 %)	271 (100 %)	264 (100%)	89 (100%)	357 (100 %)	45 (100 %)

Sumber diolah dari: Undang-Undang Imigrasi 1959/63 (UU No. 155), Undang-Undang Passport 1966 (UU No. 150), Undang-Undang Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007 (UU No. 670), Peraturan-Peraturan Migrasi 1963, UU Ketenagakerjaan 1968 (UU No. 796), Undang-Undang Penjara 1995 (UU No. 537) dan Peraturan (Administrasi dan Manajemen Depot Imigrasi) Migrasi 2003

Berdasarkan dari tabel analisa diatas, indikator aktor untuk ketujuh regulasi penanganan ilegal imigran di Malaysia didominasi oleh pendekatan realisme dengan persentase frekuensi untuk masing-masing regulasi yaitu UU No. 155 sebesar 96.44% dengan jumlah frekuensi 597, UU No. 150 sebesar 100 % dengan jumlah frekuensi 110, UU No. 670 sebesar 94.83% dengan jumlah frekuensi 257, Peraturan Migrasi 1963 sebesar 98.10% dengan jumlah frekuensi 259, Peraturan Depot Imigrasi 2003 sebesar 100 % dengan jumlah frekuensi 89, UU No. 537 sebesar 97.19% dengan jumlah frekuensi 347 dan UU No. 796 sebesar 82.22% dengan jumlah frekuensi 37. Keseluruhan persentase untuk seluruh regulasi ialah sebesar 96.63% dengan jumlah frekuensi kata 1.696.

Pemilihan diksi kata untuk indikator aktor dengan pendekatan realisme berjumlah 47 diksi kata dan kemudian diklasifikasikan menurut definisi dan fungsinya. Pengklasifikasiannya yaitu Pemerintah Federal, Pemerintah Negara Bagian, polisi, militer, pengadilan dan istilah khusus dengan catatan dibedakannya Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian dikarenakan Sabah dan Sarawak memiliki kewenangan khusus untuk mengatur sendiri sistem migrasinya.

Klasifikasi diksi kata yang paling sering muncul adalah Pemerintah Federal dengan diksi kata yaitu *Commissioner General, Council for Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants, Customs Officer, Dental Officer, Director General, Director of Immigration, Enforcement Officer, Federal Government, High Level Committee, Immigration Officer, Labour Officer, Medical Officer, Minister, Ministry, Parole Officer, Port Officer, Protection Officer, Prison Officer, Government of Malaysia, Peninsular Malaysia, Secretary General of the Ministry, Seizing Officer, dan Social Welfare Officers*. Semua diksi kata tersebut memberikan definisi spesifik dalam masing-masing pejabat negara yang

berfungsi dalam penanganan imigran ilegal di Malaysia dengan beberapa pengecualian diksi kata seperti *Federal Government*, *Government of Malaysia* dan *Peninsular Malaysia* yang hanya memberikan definisi umum dari Pemerintah Federal. Persentase jumlah diksi kata untuk klasifikasi ini adalah sebesar 53,47 % dengan jumlah frekuensi 907.

Klasifikasi paling banyak kedua yaitu istilah khusus dengan diksi kata yaitu *Controller*, *Country*, *Officer in charge*, *State*, *the Government* dan *the state*. Diksi kata *Controller* memiliki makna “seorang petugas Migrasi atau orang lain yang diotorisasi oleh *Controller* untuk bertugas secara umum atas namanya berdasarkan peraturan-peraturan dari regulasi yang ada” (Peraturan-Peraturan Migrasi 1963 Pasal 1 bagian (1)); diksi kata *Officer in charge* memiliki makna “petugas Migrasi senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk bertugas dalam sebuah Depot Imigrasi” (Peraturan Depot Imigrasi 2003 Pasal 2) dan “petugas penjara yang tidak berada di bawah Asisten Komisaris Penjara yang bertanggung jawab terhadap tempat tahanan” (UU No. 537 Pasal 2 ayat (1)); diksi kata *State* dan *the State* secara umum memiliki makna wilayah negara bagian, tetapi terkadang memiliki pengertian negara utuh; diksi kata *the Government* memiliki makna pemerintah secara umum. Persentase jumlah diksi untuk Klasifikasi ini adalah sebesar 27,77 % dengan jumlah frekuensi 471.

Klasifikasi yang paling banyak ketiga adalah Pemerintah Negara bagian dengan diksi kata yaitu *East Malaysian State*, *Government of the State*, *Sabah* dan *Sarawak*. Semua diksi kata ini mewakili Pemerintah Negara Bagian secara umum tanpa penyebutan spesifikasi jabatannya dikarenakan Sabah dan Sarawak memiliki sistem Migrasi berbeda dan ketujuh regulasi yang dianalisis di dalam penelitian ini hanya membahas secara umum tentang hak-hak khusus kedua negara bagian

tersebut dalam Migrasi, tetapi hal ini juga tidak menghindari fakta bahwa beberapa pejabat negara yang disebutkan di dalam Klasifikasi pertama memiliki juga ada di dalam struktural Pemerintah Negara Bagian. Persentase jumlah kata diksi kata untuk Klasifikasi ini adalah sebesar 14.50 % dengan jumlah frekuensi 246.

Klasifikasi yang paling banyak keempat ialah Pengadilan dengan diksi kata yaitu *Court in Sabah, Court in Sarawak, Judicial Officer, Magistrate, Public Prosecutor, Session Court Judge, Judiciary* dan *Subordinate Courts*. Semua diksi kata ini mewakili fungsi yudikatif dalam hal penanganan imigran ilegal di tingkat federal dan negara bagian. Persentase jumlah diksi kata untuk Klasifikasi ini adalah sebesar 4.06 % dengan jumlah frekuensi 69.

Klasifikasi yang paling banyak kelima adalah polisi dengan hanya satu diksi kata yaitu *Police*. Diksi kata ini mewakili fungsi polisi yang berdiri sendiri yaitu sebagai aparaturnya penegak hukum dalam menjaga kehidupan lingkungan sipil dan domestik Malaysia. Persentase jumlah diksi kata dalam Klasifikasi ini adalah sebesar 3.41 % dengan jumlah frekuensi 58.

Klasifikasi yang terakhir adalah militer dengan diksi kata yaitu, *Air Force, Military* dan *Naval*. Semua diksi kata ini mewakili fungsi kemiliteran sebagai aparaturnya negara dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan wilayah Malaysia, baik secara domestik maupun internasional. Persentase jumlah diksi kata untuk Klasifikasi ini adalah sebesar 0.23 % dengan jumlah frekuensi 4.

Diksi kata yang memiliki persentase paling besar ialah *Director General* sebesar 10.02 % dengan jumlah frekuensi 176, *Immigration Officer* sebesar 7.86 % dengan jumlah frekuensi 138 dan *Minister* sebesar 7.63 % dengan jumlah frekuensi 134. Di satu sisi, diksi kata yang memiliki persentase paling sedikit ialah *Air Force, Court in Sabah,*

Government of the State, Naval dan Social Welfare Officers semuanya sebesar 0.05 % dengan jumlah frekuensi 1. Diksi kata yang tidak memiliki frekuensi sama sekali ialah *Court in Sarawak, Government of Malaysia, Session Court Judge dan Judiciary*.

Berdasarkan dari hasil kesimpulan ini dan ditambahkan dengan kesimpulan klasifikasi, aktor realisme yang memiliki peran paling sedikit di dalam penanganan imigran ilegal di Malaysia ialah berasal dari kelompok militer. Hal ini bisa dilihat dari jumlah persentase mereka yang hanya sebesar 0.23 % dengan rata-rata jumlah frekuensi mereka 1 dan 2. Ini menunjukkan bahwa peran militer sebagai aparaturnegara di dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan di Malaysia tidak memiliki signifikansi penanganan imigran ilegal di Malaysia. Kemudian, isi dari UU No. 150 pasal 28 ayat (1) dan UU. No. 537 pasal 2 ayat (1) (dua regulasi yang memiliki penyebutan Klasifikasi militer) hanya menyebutkan:

“Any person who arrives in Malaysia or who is about to leave Malaysia shall fully and truthfully answer all questions and enquiries put to him by an immigration officer, or a senior police officer, tending directly or indirectly to establish his identity, nationality or occupation or bearing on any of the restrictions contained in this Act or any absolute or conditional liability on his part to any military, naval or air force service under any state or country whatsoever, and shall disclose and produce to any such officer on demand all documents in his possession relating to those matters”

Dan “...”*court*” means a court establish by or under Part IX of the Federal Constitution and shall include (a) *Syariah Courts*; (b) *Native Courts*; and (c) *Military Courts...*”. Lain halnya dengan Klasifikasi polisi yang memiliki persentase 3.48 % dengan jumlah frekuensi 58, jauh lebih banyak dibandingkan dengan Klasifikasi militer.

Polisi memegang peranan yang jauh lebih penting sebagai fungsinya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam penanganan imigran ilegal di Malaysia. Hal ini juga didukung dengan isi UU No. 155 pasal 41 (UU yang dimana diksi kata polisi yang paling sering muncul) “*All police officers shall, when so requested by a senior immigration officer, receive and execute according to the tenor thereof any written order of the Director General, and any warrant of the Director General for the arrest, detention or removal of any person made under this Act.*”

Terakhir, Klasifikasi yang mendominasi peran penanganan imigran ilegal di Malaysia ialah Pemerintah Federal dengan *Director General, Immigration Officer* dan *Minister* seperti yang telah disebutkan diatas. *Director General* bermakna “Direktur Jenderal Migrasi yang ditunjuk oleh Kepala Negara Malaysia” (UU No. 155 pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (1)); *Immigration Officer* bermakna “Petugas Migrasi dari berbagai pangkat dan jabatan” (UU No. 155 pasal 3 ayat (1), (1A), (1B)); *Minister* bermakna “Menteri yang bertanggung jawab di dalam Migrasi dan bidang relevan lainnya”. Hal ini menunjukkan bahwa pejabat negara di dalam Pemerintah Federal memegang peranan utama dalam pelaksanaan dan perumusan kebijakan penanganan imigran ilegal di seluruh wilayah Malaysia, dengan Direktur Jenderal Migrasi, Petugas Migrasi dan Menteri yang memiliki peran paling banyak.

Indikator aktor dengan pendekatan konstruktivisme memiliki persentase terbesar kedua setelah realisme dan kelima regulasi yang dianalisis di dalam penelitian ini memiliki diksi katanya yaitu UU No. 155 sebesar 1.12 % dengan jumlah frekuensi 7, UU No. 670 sebesar 2.62 % dengan jumlah frekuensi 7, Peraturan-Peraturan Migrasi 1963 sebesar 0.75 % dengan jumlah frekuensi 2, UU No. 537 sebesar 4.56 % jumlah frekuensi 10 dan UU No. 796 sebesar 8 dengan jumlah frekuensi 8. Keseluruhan

persentase untuk seluruh regulasi ialah sebesar 1.93 % dengan jumlah frekuensi 34.

Pemilihan diksi kata untuk pendekatan konstruktivisme sebanyak 13 diksi kata dan terdapat 4 Klasifikasi di dalam pendekatan konstruktivisme berdasarkan dari definisinya. Klasifikasinya ialah Perjanjian Tertulis, Negara Asing, Organisasi dan Yurisdiksi Asing.

Klasifikasi yang paling sering muncul adalah Negara Asing dengan diksi kata *Consular Officer*, *Consular Representative*, *Foreign Country*, *Foreign State*, dan *International Governmental Organization*. Semua diksi kata ini mewakili pihak satu atau lebih negara asing yang memiliki andil dan pengaruh dalam kebijakan penanganan imigran ilegal di Malaysia. Persentase diksi kata untuk Klasifikasi ini adalah sebesar 52.94% dengan jumlah frekuensi 18.

Klasifikasi yang paling sering muncul kedua ialah Perjanjian Tertulis dengan diksi kata *Convention*, *International Code* dan *International Treaty*. Semua diksi kata ini mewakili perjanjian dan konvensi tertulis tentang kerjasama penanganan imigran ilegal, terutama perjanjian dan konvensi bilateral maupun multilateral. Persentase diksi kata untuk Klasifikasi ini adalah sebesar 29.41 % dengan jumlah frekuensi 10. Klasifikasi yang paling sering muncul ketiga ialah Organisasi dengan diksi kata *International Non-Governmental Organizations*, *Organization*, *Non-Governmental Organization* dan *Relevant Organizations*. Semua diksi kata ini mewakili organisasi, terutama organisasi yang diwakili oleh aktor non-negara di dalam wilayah domestik dan internasional Malaysia, tetapi untuk diksi kata *Organization* dan *Relevant Organizations* secara umum diwakili oleh aktor negara dan non-negara. Persentase diksi kata untuk Klasifikasi ini adalah sebesar 17.64 % dengan jumlah frekuensi 6.

Klasifikasi terakhir ialah Yurisdiksi asing dengan diksi kata *Foreign Jurisdiction*, dimana diksi kata ini mewakili pihak-pihak yurisdiksi dan yudikatif asing dalam proses pelaksanaan kebijakan penanganan imigran ilegal di Malaysia. Klasifikasi ini tidak memiliki frekuensi.

Diksi kata terbanyak dalam indikator aktor dengan pendekatan konstruktivisme ialah *Foreign State* sebesar 0.56 % dengan jumlah frekuensi 10, *Foreign Country* sebesar 0.51 % dengan jumlah frekuensi 9 dan *Consular Officer* sebesar 0.28 dengan jumlah frekuensi 5. Diksi kata yang memiliki persentase terkecil ialah *Relevant Organizations* sebesar 0.11 % dengan jumlah frekuensi 2, *Non-Governmental Organizations* dan *International Code* sebesar 0.05 % dengan jumlah frekuensi 1. Diksi kata yang tidak memiliki frekuensi adalah *Consular Representative*, *Foreign Jurisdiction*, *International Governmental Organization*, *International Treaty* dan *International Non-Governmental Organizations*.

Berdasarkan dari hasil kesimpulan ini dan ditambahkan dengan kesimpulan Klasifikasi, aktor konstruktivisme yang memiliki peran paling sedikit ialah Yurisdiksi Asing. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya diksi kata yang muncul di dalam regulasi yang di analisis. Di satu sisi, aktor konstruktivisme yang memiliki peran paling banyak ialah Negara Asing. Hal ini ditunjukkan dengan 3 diksi kata dengan persentase terbesar berasal dari Klasifikasi Negara Asing dan Klasifikasi Negara Asing menjadi Klasifikasi dengan persentase terbesar. Peran Negara Asing kemudian dijelaskan lebih detail di dalam UU No. 155, UU No. 670 dan UU No. 537; diksi kata *Consular Officer* dan *Foreign Country*:

“...where in any proceeding for any offence under this Act a testimony of any person in respect of whom an order for removal from...there shall be admissible in evidence before that court any deposition relating to the subject matter of that proceeding made by that person...

(b) outside Malaysia before a consular officer or a judicial officer of a foreign country in the presence or absence of the person charged with the offence..." (UU No. 155 pasal 40A ayat (1)).

Dan *"...where in any proceeding for an offence under this Act a testimony of any person in respect of whom an order of removal from Malaysia...there shall be admissible in evidence before that court any deposition relating to the subject matter of that proceeding made by that person...(b) outside Malaysia before a consular officer or a judicial officer of a foreign country in the presence or absence of the person charged with the offence..."* (UU No. 155 pasal 40A ayat (1))

Diksi kata *Foreign State*:

"In relation to a transferred prisoner to Malaysia from the prescribed foreign State— (a) if the transferred prisoner did not receive any remission of sentence at the prescribed foreign State, the transferred prisoner shall be entitled for remission calculated on the balance of his sentence to be served in Malaysia..." (UU No. 537 pasal 46S ayat (1) poin a).

Pendekatan liberalisme memiliki persentase terkecil di dalam indikator aktor dengan tiga regulasi yang memiliki diksi kata liberalisme di dalamnya. Persentase masing regulasi ialah UU No. 155 sebesar 2.41 % dengan jumlah frekuensi 15, UU No. 670 sebesar 2.62 % dengan jumlah frekuensi 7 dan Peraturan Depot Imigrasi 2003 sebesar 1.13 % dengan jumlah frekuensi 3. Keseluruhan persentase untuk pendekatan ini adalah sebesar 1.42 % dengan jumlah frekuensi 25.

Pemilihan diksi kata untuk pendekatan liberalisme terdapat 4 diksi kata dengan 2 Klasifikasi, yaitu Grup Profit dan Individu.

Klasifikasi yang paling sering muncul adalah Grup Profit dengan diksi kata *Corporation*, *Company* dan *Corporate*. Semua diksi kata ini mewakili pihak-pihak perkumpulan dengan tujuan profit atau perusahaan secara umum yang ikut ambil bagian dalam kebijakan penanganan imigran ilegal di Malaysia. Jumlah persentase Klasifikasi ini ialah sebesar 100 % dengan jumlah frekuensi 25.

Klasifikasi terakhir ialah Individu dengan diksi kata *Individual*, dimana diksi kata ini mewakili pihak individu bukan negara atau pemerintah yang ikut ambil bagian dalam pelaksanaan kebijakan penanganan imigran ilegal di Malaysia. Klasifikasi ini tidak memiliki frekuensi.

Diksi kata di dalam indikator aktor dengan pendekatan liberalisme yang memiliki persentase terbesar ialah *Corporate* sebesar 1,02 % dengan jumlah frekuensi 18 dan *Company* sebesar 0.39 % dengan jumlah frekuensi 7. Diksi kata yang tidak memiliki frekuensi ialah *Corporation* dan *Individual*.

Berdasarkan dari hasil kesimpulan ini dan ditambahkan dengan kesimpulan Klasifikasi, pihak perusahaan memiliki peran paling banyak di dalam aktor liberalisme dikarenakan semua diksi kata dengan persentase terbesar berasal dari Klasifikasi Grup Profit, yang juga merupakan Klasifikasi dengan persentase terbesar. Hal ini mengindikasikan adanya signifikansi peran perusahaan sebagai perkumpulan profit kebijakan penanganan imigran ilegal di Malaysia. Peran perusahaan di dalam penanganan imigran ilegal di Malaysia lebih detail yaitu diksi kata *Company* “...is unable to pay the cost of the repatriation of himself and his family, if any, and that no government, organisation, company or person is liable or willing to pay the cost of repatriation...”(UU No. 155 pasal 46 ayat (2)); dan diksi kata *Corporate* “...Where the offence under subsection (1) has been committed by a body corporate, the body corporate shall

be guilty of that offence...” (UU No. 155 pasal 55A ayat (2)). Terakhir, tidak adanya sama sekali peran individu bukan negara dikarenakan tidak munculnya diksi kata di dalam seluruh regulasi yang dianalisis.

Jadi, indikator aktor dalam manajemen kebijakan penanganan imigran ilegal didominasi oleh pendekatan realisme dengan pihak Pemerintah Federal yang memiliki peran paling utama, pendekatan konstruktivisme memiliki persentase terbesar kedua dengan pihak negara asing yang memiliki peran terbanyak dan pendekatan liberalisme memiliki persentase terkecil dengan pihak perusahaan yang memiliki peran terbanyak di dalam penanganan kebijakan imigran ilegal di Malaysia.

B. Analisis Indikator Otoritas Dalam Manajemen Kebijakan Penanganan Migrasi Ilegal

Indikator kedua yang akan dianalisis adalah otoritas dalam manajemen kebijakan penanganan Migrasi ilegal. Indikator otoritas mewakili segala jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada struktural dan fungsional tertentu di dalam kebijakan penanganan imigran ilegal di Malaysia. Kewenangan tersebut mencakup proses investigasi, penangkapan, pengadilan, penjatuhan hukuman dan pelepasan kembali. Semua kewenangan tersebut kemudian dibagi menjadi kedalam tiga pendekatan besar, yaitu realisme, liberalisme dan konstruktivisme untuk ditentukan pendekatan mana yang paling dominan dalam indikator aktor. Berikut dibawah ini merupakan hasil analisis tabel distribusi frekuensinya.

Tabel 4.2 Hasil analisis isi indikator otoritas dalam manajemen kebijakan penanganan Migrasi ilegal

Pendekatan	No.	Diksi Kata	Frekuensi (%)						
			Act 155	Act 150	Act 670	Immigration Regulations 1963	Immigration Detention Regulations 2003	Act 537	Act 796
REALI SME	1.	Arrest	19 (3.97%)	5 (4.31%)	6 (1.53%)	0	0	0	0
	2.	Charge	17 (3.55%)	12 (10.34%)	7 (1.79%)	0	58 (54.20%)	59 (6.17%)	0
	3.	Compound	5 (1.04%)	0	0	0	0	0	0
	4.	Confinement	0	0	0	0	5 (4.67%)	6 (0.62%)	0
	5.	Consent	6 (1.25%)	1 (0.86%)	7 (1.79%)	5 (3.12%)	0	2 (0.20%)	0
	6.	Conviction	18 (3.76%)	6 (5.17%)	33 (7.52%)	1 (0.62%)	0	11 (1.15%)	7 (5.26%)

7.	Corporal Punishment	0	0	0	0	0	2 (0.20 %)	0
8.	Court	27 (5.6 4%)	6 (5.17 %)	34 (8.43 %)	0	0	38 (3.97 %)	1 (0.75 %)
9.	Custody	7 (1.4 6%)	1 (0.86 %)	5 (1.27 %)	0	7 (6.54%)	31 (3.24 %)	2 (1.50 %)
10.	Deportation	0	1 (0.86 %)	0	0	1 (0.93%)	0	0
11.	Detain	23 (4.8 1%)	6 (5.17 %)	4 (1.02 %)	0	1 (0.93%)	8 (0.83 %)	0
12.	Detection	1 (0.2 0%)	1 (0.86 %)	0	0	0	0	0
13.	Detention	19 (3.9 7%)	3 (2.58 %)	5 (1.27 %)	6 (3.75%)	3 (2.80%)	6 (0.62 %)	0
14.	Execution	1 (0.2 0%)	0	2 (0.51 %)	1 (0.62%)	0	2 (0.20 %)	0
15.	Fine	22 (4.1 8%)	6 (5.17 %)	30 (7.67 %)	3 (1.87%)	0	12 (1.25 %)	5 (3.75 %)

16.	Hearing	1 (0.20%)	0	2 (0.51%)	0	2 (1.86%)	1 (0.10%)	0
17.	Identification	4 (0.83%)	0	3 (0.76%)	8 (5%)	0	0	0
18.	Imprisonment	17 (3.55%)	6 (5.17%)	24 (6.13%)	2 (1.25%)	0	57 (5.96%)	5 (3.75%)
19.	Inquiries	10 (2.09%)	0	0	1 (0.62%)	0	1 (0.10%)	0
20.	Inspection	4 (0.83%)	0	1 (0.25%)	0	0	2 (0.20%)	1 (0.75%)
21.	Interrogation	7 (1.46%)	0	0	0	0	0	0
22.	Investigation	2 (0.41%)	4 (3.44%)	19 (4.85%)	0	2 (1.86%)	0	0
23.	Lock ups	0	0	0	0	0	6 (0.62%)	0
24.	Penalty	4 (0.83%)	2 (1.72%)	9 (2.30%)	0	0	3 (0.31%)	3 (2.25%)

25.	Prison	2 (0.4 1%)	1 (0.86 %)	0	0	0	322 (33.68 %)	0
26.	Prosecute	3 (0.6 2%)	2 (1.72 %)	0	0	0	0	0
27.	Removal	27 (5.6 4%)	6 (5.17 %)	9 (2.30 %)	7 (4.37%)	0	12 (1.25 %)	0
28.	Restriction on media	0	0	2 (0.51 %)	0	0	0	0
29.	Sanction	6 (1.2 5%)	0	0	0	0	0	0
30.	Search	9 (1.8 8%)	9 (7.75 %)	16 (4.09 %)	0	6 (5.60%)	1 (0.10 %)	0
31.	Seize	6 (1.2 5%)	12 (10.34 %)	20 (5.11 %)	0	0	0	0
32.	Sentence of death	0	0	0	0	0	4 (0.41 %)	0
33.	Stop	1 (0.2 0%)	4 (3.44 %)	1 (0.25 %)	0	0	0	3 (2.25 %)

	34.	Summon	4 (0.83%)	0	0	0	0	1 (0.10%)	0
	35.	Supervise	0	0	1 (0.25%)	0	0	3 (0.31%)	0
	36.	Termination of employment	0	0	0	0	0	0	2 (1.50%)
	37.	Transferred	0	0	0	0	1 (0.93%)	28 (2.92%)	0
	37.	Warrant	4 (0.83%)	6 (5.17%)	9 (2.30%)	5 (3.12%)	0	13 (1.35%)	1 (0.75%)
	38.	Whipping	8 (1.67%)	1 (0.86%)	0	0	0	0	0
TOTAL			284 (51.88%)	101 (87.06%)	248 (63.42%)	39 (24.37%)	86 (80.37%)	629 (65.79%)	30 (22.55%)
LIBER ALISM E	1.	Aid	0	0	2 (0.51%)	0	0	1 (0.10%)	0
	2.	Commutatio n	0	0	0	0	0	2 (0.20%)	0

3.	Contract of Service	0	0	0	1 (0.62%)	0	0	2 (1.50%)
4.	Cooperating	0	0	1 (0.25%)	39 (24.37%)	0	0	0
5.	Discharge	11 (2.30%)	2 (1.72%)	1 (0.25%)	0	4 (3.73%)	9 (0.94%)	0
6.	Employment	3 (0.62%)	0	5 (1.27%)	0	0	16 (1.68%)	63 (47.36%)
7.	Employment Permit	0	0	0	0	0	0	36 (27.06%)
8.	Facilitate the return	0	0	1 (0.25%)	0	0	0	0
9.	Granted	12 (2.51%)	0	4 (1.02%)	3 (1.87%)	0	8 (0.83%)	1 (0.75%)
10.	Health Services	0	0	0	0	0	2 (0.20%)	0
11.	Hospitalization	0	0	3 (0.76%)	0	0	0	0

12.	Maintenance	6 (1.25%)	1 (0.86%)	3 (0.76%)	5 (3.12%)	0	2 (0.20%)	0
13.	Medical treatment	1 (0.20%)	0	1 (0.25%)	2 (1.25%)	0	0	0
14.	Pardon	1 (0.20%)	0	0	0	0	4 (0.41%)	0
15.	Parole	0	0	0	0	0	202 (21.12%)	0
16.	Permit	88 (18.41%)	0	1 (0.25%)	47 (29.375%)	0	3 (0.31%)	0
17.	Petition	2 (0.41%)	0	0	1 (0.62%)	0	0	0
18.	Political rights	2 (0.41%)	0	0	0	0	0	0
19.	Protection	2 (0.41%)	0	53 (13.55%)	0	0	2 (0.20%)	0
20.	Protect the informer	0	0	1 (0.25%)	0	0	0	0

21.	Release	7 (1.46%)	4 (3.44%)	7 (1.79%)	0	0	17 (1.77%)	0
22.	Remission	0	0	0	0	0	22 (2.30%)	0
23.	Repatriation	9 (1.88%)	0	0	4 (2.5%)	0	0	0
24.	Report of unfitness	0	0	0	0	2 (1.86%)	0	0
25.	Reward	3 (0.62%)	1 (0.86%)	0	0	0	13 (1.35%)	0
26.	Rights protection	0	0	0	0	0	0	0
27.	Rights grant	0	0	0	0	0	0	0
28.	Right of entry	4 (0.83%)	0	0	0	0	0	0
29.	Right to be heard	2 (0.41%)	0	0	0	0	0	0
30.	Right to enter	4 (0.83%)	0	0	0	0	0	0
31.	Sureties	2 (0.41%)	0	0	0	0	1 (0.10%)	0

	32.	Suspend	0	0	0	0	0	3 (0.31 %)	1 (0.75 %)
	33.	Visit	0	0	0	17 (14.64%)	11 (10.28%)	5 (0.52 %)	0
TOTAL			157 (32.84 %)	8 (6.89 %)	83 (21.22 %)	119 (74.37%)	17 (15.88%)	312 (32.63 %)	103 (77.44 %)
KONST RUKTI VISME	1.	Advising	0	0	3 (0.68 %)	0	0	0	0
	2.	Advocate	0	0	2 (0.46 %)	0	1 (0.93%)	0	0
	3.	Combat	0	0	2 (0.46 %)	0	0	0	0
	4.	Evaluation	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Examination	23 (4.81 %)	4 (3.44 %)	15 (3.42 %)	2 (1.72%)	2 (1.86%)	1 (0.10 %)	0
	6.	International transfer	0	0	0	0	0	6 (0.62 %)	0

7.	Place of refuge	0	0	31 (7.06%)	0	0	0	0
8.	Precaution	3 (0.62%)	0	0	0	0	0	0
9.	Prevent	11 (2.30%)	3 (2.58%)	4 (0.91%)	0	0	2 (0.20%)	0
10.	Proper accommodation	0	0	0	0	0	0	0
11.	Recommendations	0	0	2 (0.46%)	0	1 (0.93%)	0	0
12.	Reprimand	0	0	0	0	0	1 (0.10%)	0
13.	Segregation	0	0	0	0	2 (1.86%)	3 (0.31%)	0
14.	Separation	0	0	1 (0.23%)	0	0	2 (0.20%)	0
TOTAL		37 (7.74%)	7 (6.03%)	60 (17.77%)	2 (1.72%)	4 (3.78%)	15 (1.56%)	0

TOTAL	478 (100 %)	116 (100 %)	391 (100 %)	160 (100%)	107 (100%)	956 (100 %)	133 (100 %)
--------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	----------------------------	----------------------------

Sumber diolah dari: Undang-Undang Imigrasi 1959/63 (UU No. 155), Undang-Undang Passport 1966 (UU No. 150), Undang-Undang Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007 (UU No. 670), Peraturan-Peraturan Migrasi 1963, UU Ketenagakerjaan 1968 (UU No. 796), Undang-Undang Penjara 1995 (UU No. 537) dan Peraturan (Administrasi dan Manajemen Depot Imigrasi) Migrasi 2003

Berdasarkan dari tabel analisa diatas, analisis indikator otoritas didominasi oleh pendekatan realisme, dimana lima dari tujuh regulasi didominasi oleh pendekatan realisme dengan persentase untuk tiap regulasi yaitu, UU No. 155 sebesar 51.88 % dengan jumlah frekuensi 284, UU No. 150 sebesar 87.06 % dengan jumlah frekuensi 101, UU No. 670 sebesar 63.42 % dengan jumlah frekuensi 248, Peraturan Depot Imigrasi 2003 sebesar 80.37 % dengan jumlah frekuensi 86 dan UU No. 532 sebesar 65.79 % dengan jumlah frekuensi 629. Dua regulasi yang tidak didominasi oleh pendekatan realisme adalah Peraturan Migrasi 1963 dengan persentase sebesar 24.37 % dan jumlah frekuensi 39; dan UU No. 796 dengan persentase sebesar 22.55 % dan jumlah frekuensi 30. Keseluruhan persentase untuk pendekatan realisme adalah sebesar 60.51 % dengan jumlah frekuensi 1.416.

Pemilihan diksi kata untuk pendekatan realisme berjumlah 39 diksi kata dan kemudian akan diklasifikasikan menjadi 5 berdasarkan jenis kewenangannya. Pengklasifikasiannya adalah Pemberian Hukuman, Penangkapan, Proses Investigasi, Peradilan dan Kewenangan Lainnya

Pemilihan diksi kata untuk pendekatan realisme berjumlah 39 diksi kata dan kemudian akan diklasifikasikan menjadi 5 berdasarkan jenis kewenangannya. Pengklasifikasiannya adalah Pemberian Hukuman, Penangkapan, Proses Investigasi, Peradilan dan Kewenangan Lainnya.

Klasifikasi yang paling sering muncul adalah Pemberian Hukuman dengan diksi kata yaitu *compound*, *corporal punishment*, *fine*, *imprisonment*, *lock ups*, *penalty*, *prison*, *sanction*, *sentence of death* dan *whipping*. Semua diksi kata ini mewakili jenis hukuman yang diberikan kepada imigran ilegal yang tertangkap, dan biasanya diberikan melalui atau tanpa proses peradilan, walaupun untuk diksi kata *penalty* dan *sanction* lebih

mewakili jenis hukuman yang tidak spesifik. Persentase untuk klasifikasi ini adalah sebesar 40.04 5% dengan jumlah frekuensi 567.

Klasifikasi kedua yang paling sering muncul adalah Peradilan dengan diksi kata yaitu *court, execution, hearing, prosecute, consent, charge, conviction, deportation, transferred* dan *removal*. Semua diksi kata ini mewakili segala hal dalam proses memeriksa, memutus dan mengadili perkara imigran ilegal yang tertangkap, walaupun tidak secara tahapannya. Persentase untuk klasifikasi ini adalah sebesar 32.83 % dengan jumlah frekuensi 465.

Klasifikasi ketiga yang paling sering muncul adalah Investigasi dengan diksi kata yaitu *identification, detection, inquiries, inspection, interrogation, investigation, seize, search, stop, summon* dan *warrant*. Semua diksi kata ini mewakili prosesi pemeriksaan dan pencarian terhadap imigran ilegal yang tertangkap, dan biasanya dilakukan sebelum proses peradilan dimulai. Persentase untuk klasifikasi ini adalah sebesar 14.26 % dengan jumlah frekuensi 202.

Klasifikasi keempat yang paling sering muncul adalah Penangkapan dengan diksi kata yaitu *arrest, detain, detention, custody* dan *confinement*. Semua diksi kata ini mewakili jenis-jenis penangkapan imigran ilegal dan yang membedakan untuk diksi kata yang memiliki makna sama adalah waktu dan tempat penangkapannya. Persentase jumlah klasifikasi ini adalah sebesar 8.96 % dengan jumlah frekuensi 177.

Klasifikasi yang terakhir adalah Kewenangan Lainnya dengan diksi kata *restriction on media, supervise* dan *termination of employment*. Semua diksi kata ini mewakili jenis-jenis kewenangan yang tidak dikategorisasikan dalam klasifikasi sebelumnya.

Persentase untuk klasifikasi ini adalah 0.56 % dengan jumlah frekuensi 8.

Diksi kata dalam pendekatan realisme yang memiliki persentase terbesar yaitu *prison* sebesar 13.88 % dengan jumlah frekuensi 325, *charge* sebesar 6.53 % dengan jumlah frekuensi 153 dan *imprisonment* sebesar 4.74 % dengan jumlah frekuensi 111. Diksi kata yang memiliki persentase terkecil ialah *corporal punishment*, *restriction on media*, *detection* dan *supervise* dengan kesemuanya sebesar 0.08 % dengan jumlah frekuensi 2.

Berdasarkan dari hasil kesimpulan ini dan ditambahkan dengan kesimpulan klasifikasi, otoritas dalam pendekatan realisme yang paling jarang dilaksanakan ialah kewenangan yang berada di luar proses investigasi hingga peradilan, seperti pembatasan terhadap media dan pengawasan dimana diksi kata *detection* yang bermakna proses pemeriksaan dan diksi kata *corporal punishment* yang bermakna hukuman fisik yang masing-masing masuk kedalam klasifikasi sebelumnya, tetapi karena banyaknya jenis kewenangan sejenis lainnya yang memiliki persentase lebih besar di dalam klasifikasi tersebut, maka kedua diksi kata tersebut dianggap secara umum tidak mewakili kewenangan yang paling sedikit dilaksanakan. Penggunaan *restriction on media* dan *supervise* di dalam regulasi yang dianalisis ialah:

“*Notwithstanding any written laws to the contrary, any mass media report... shall not reveal the name or address, or include any particulars calculated to lead to the identification of any trafficked person or smuggled migrant so concerned either as being the trafficked person or smuggled migrant or as being a witness to any proceedings.*” (UU No. 670 pasal 58 ayat (1)) dan “*...supervise and control all matters in connection with any prison, the administration of which is vested in him...*” (UU No. 537 pasal 13 ayat (1) poin b).

Otoritas dalam pendekatan realisme yang paling banyak dilaksanakan ialah pemberian hukuman tahanan. Diksi kata *charge* tidak memiliki interpretasi khusus dalam regulasi dan lebih bermakna pembebanan hukuman atau sesuatu yang menjadi tanggung jawab kepada imigran ilegal atau pihak tertentu lainnya; diksi kata *prison* dan *imprisonment* memiliki makna yang sama yaitu hukuman tahanan, dan penggunaan dua diksi ini dikarenakan keduanya digunakan di dalam regulasi yang dianalisis, dengan diksi kata "*imprisonment*" ditaruh di dalam pasal yang membahas tentang spesifikasi hukuman. Salah satu penggunaan diksi kata ini, yaitu di dalam UU No. 155 pasal 57 berbunyi "*Any person guilty of an offence against this Act for which no special penalty is provided shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding ten thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both.*". Hukuman tahanan menjadi kewenangan yang paling sering dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan penanganan imigran ilegal di Malaysia kepada semua pihak yang terkait di dalam pelaksanaan Migrasi ilegal berdasarkan regulasi yang berlaku.

Indikator otoritas dengan pendekatan liberalisme adalah pendekatan dengan urutan kedua di dalam otoritas pelaksanaan kebijakan imigran ilegal di Malaysia dengan dua dari tujuh regulasi memiliki persentase yang lebih besar dari pendekatan realisme. Persentase untuk UU tersebut ialah Peraturan Migrasi 1963 sebesar 74.37% dengan jumlah frekuensi 119 dan UU No. 796 sebesar 77.44 % dengan jumlah frekuensi 103. Persentase untuk regulasi lainnya yaitu UU No. 155 sebesar 32.84 % dengan jumlah frekuensi 157, UU No. 150 sebesar 6.89 % dengan jumlah frekuensi 8, UU No. 670 sebesar 21.22 % dengan jumlah frekuensi 83, Peraturan Depot Imigrasi 2003 sebesar 15.88 % dengan jumlah frekuensi 17 dan UU No. 537 sebesar 32.77 % dengan jumlah frekuensi 312. Keseluruhan persentase untuk pendekatan liberalisme adalah sebesar 34.14 % dengan jumlah frekuensi 799.

Pemilihan diksi kata untuk pendekatan liberalisme berjumlah 33 diksi kata dan dibagi kedalam enam klasifikasi yaitu Pembebasan, Peringatan, Pemberian Izin Kembali, Pemberian Hak dan Perlindungan.

Klasifikasi yang paling sering muncul yaitu Pemberian Izin dengan diksi kata *contract of service, employment, employment permit* dan *permit*. Semua diksi kata ini mewakili kewenangan pelaksana kebijakan dalam memberikan izin tertentu kepada pihak yang baru masuk atau orang yang pernah tertangkap dan dijatuhi hukuman, terutama dalam bentuk perizinan bekerja dikarenakan tujuan imigran ilegal datang ke Malaysia didominasi untuk tujuan bekerja. Persentase untuk klasifikasi ini adalah sebesar 33.16 % dengan jumlah frekuensi 265.

Klasifikasi kedua yang paling sering muncul adalah Pembebasan dengan diksi kata *discharge, facilitate the return, pardon, parole* dan *repatriation*. Semua diksi kata ini mewakili kewenangan pelaksana kebijakan dalam melepaskan dan mengampuni hukuman para pelaku dalam Migrasi ilegal. Persentase untuk klasifikasi ini adalah sebesar 30.91 % dengan jumlah frekuensi 247.

Klasifikasi ketiga yang paling sering muncul adalah Perlindungan dengan diksi kata *protection, protect the informer, rights protection, sureties, cooperating* dan *visit*. Semua diksi kata ini mewakili kewenangan pelaksana kebijakan dalam melindungi dan memberikan jaminan atas keselamatan para pihak yang terlibat di dalam Migrasi ilegal, dari tersangka hingga saksi. Persentase untuk klasifikasi ini adalah 16.77 % dengan jumlah frekuensi 134.

Klasifikasi keempat yang paling sering muncul adalah Pemberian Hak dengan diksi kata *granted, petition, political rights, rights grant, right of entry, right to be heard, right to enter* dan *reward*. Semua diksi kata ini mewakili kewenangan pelaksana dalam memberikan hak-

hak tertentu yang menguntungkan bagi beberapa pihak dalam Migrasi ilegal, baik bagi yang sudah tertangkap dan dijatuhi hukuman, masyarakat umum dan petugas pelaksana kebijakan tersebut. Persentase untuk klasifikasi ini adalah sebesar 6.75 % dengan jumlah frekuensi 54.

Klasifikasi kelima yang paling sering muncul adalah Perawatan dengan diksi kata *aid, health services, hospitalization, maintenance, medical treatment* dan *report of unfitness*. Semua diksi kata ini mewakili kewenangan pelaksanaan dalam memelihara dan merawat kesehatan para pihak yang berada dalam tahanan dalam perkara Migrasi ilegal. Persentase untuk klasifikasi ini adalah sebesar 3.87 % dengan jumlah frekuensi 31.

Klasifikasi terakhir adalah Peringatan dengan diksi kata *commutation, remission* dan *suspend*. Semua diksi kata ini mewakili kewenangan pelaksana dalam meringankan hukuman bagi pihak yang telah dijatuhi hukuman dalam proses peradilan. Persentase untuk klasifikasi ini adalah sebesar 3.50 % dengan jumlah frekuensi 28.

Diksi kata yang memiliki persentase terbesar adalah *parole* sebesar 8.63 % dengan jumlah frekuensi 202, *employment* sebesar 3.71 % dengan jumlah frekuensi 87 dan *protection* sebesar 2.43 % dengan jumlah frekuensi 2.43 %. Diksi kata dengan persentase terkecil adalah *facilitate the return* dan *protect the informer* sebesar 0.04 % dengan jumlah frekuensi 1. Diksi kata yang tidak memiliki frekuensi adalah *rights protection* dan *rights grant*.

Berdasarkan dari hasil kesimpulan ini dan ditambahkan dengan kesimpulan klasifikasi, otoritas dengan pendekatan liberalisme yang paling jarang dilaksanakan adalah pemberian hak, dengan alasan walaupun 3 diksi kata lainnya memiliki frekuensi yang sama (1 dan 0) dengan *rights grant*, tetapi mereka

termasuk kedalam klasifikasi dengan salah satu urutan teratas, sedangkan *rights grant* masuk kedalam klasifikasi Pemberian Hak, dimana klasifikasi tersebut memiliki klasifikasi salah satu yang terendah. Pemberian hak yang dimaksudkan dari *rights grant* tidak mempunyai definisi spesifik karena dia tidak memiliki frekuensi, maka dari itu, akan diambil diksi kata yang memiliki frekuensi terendah di dalam klasifikasi yang sama yaitu *right to be heard*s dan *political rights*. Penjelasan dari hak ini dijelaskan dalam regulasi yang berbunyi:

“No person and no member of a class of persons shall be given an opportunity of being heard before the Minister or the Director General, or in the case of an East Malaysian State, the State Authority, makes any order against him in respect of any matter under this Act or any subsidiary legislation made under this Act.” (UU No. 155 pasal 59) dan *“Subsection 66(1) shall not have effect in relation to a citizen entering the East Malaysian State for the sole purpose of engaging in legitimate political activity; but the burden of proof that a person is entitled to enter the East Malaysian State under this section shall lie on him.”* (UU No. 155 pasal 67).

Otoritas dalam pendekatan liberalisme yang paling sering dilaksanakan adalah *parole* yang bermakna “Pembebasan dari seorang tahanan untuk menjalankan bagian apapun dari hukumannya di luar tempat tahanan dengan berdasarkan *Parole Order*.” (UU No. 537 pasal 46A poin d) dikarenakan *parole* memiliki diksi kata dengan persentase yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dua diksi kata lainnya dan klasifikasinya yang menempati urutan kedua dengan persentase terbesar. *Parole* atau pembebasan bersyarat mengisyaratkan adanya kepedulian pelaksana kebijakan terhadap pemberian hak untuk bebas terhadap suatu individual, tetapi masih menempatkan hak untuk bebas itu kedalam batasan yang wajib untuk diikuti.

Indikator otoritas dengan pendekatan konstruktivisme menempati urutan terakhir dalam otoritas yang paling jarang dilaksanakan dengan persentase tiap regulasi yaitu UU No. 155 sebesar 7.74 % dengan jumlah frekuensi 37, UU No. 150 sebesar 6.03 % dengan jumlah frekuensi 7, UU No. 670 sebesar 17.7 % dengan jumlah frekuensi 60, Peraturan Migrasi 1963 sebesar 1.72 % dengan jumlah frekuensi 2, Peraturan Depot Imigrasi 2003 frekuensi 3.78 % dengan jumlah frekuensi 4, UU No. 537 sebesar 1.57 % dengan jumlah frekuensi 15 dan UU No. 796 tidak memiliki frekuensi. Keseluruhan untuk pendekatan konstruktivisme sebesar 5.34 % dengan jumlah frekuensi 125.

Pemilihan diksi kata untuk pendekatan ini berjumlah 14 diksi kata dengan dua klasifikasi berdasarkan targetnya, yaitu, Tidak Secara Langsung ke Pihak yang Relevan dan Secara Langsung ke Pihak yang Relevan.

Klasifikasi yang memiliki persentase terbesar adalah klasifikasi Secara Langsung ke Pihak yang Relevan dengan diksi kata *advocate, examination, international transfer, place of refuge, proper accommodation, reprimand, segregation* dan *separation*. Semua diksi kata ini mewakili kewenangan yang ditujukan secara langsung kepada pihak-pihak yang tertangkap dan dijatuhi hukuman, terutama hukuman tahanan dalam perkara Migrasi ilegal. Persentase untuk klasifikasi ini adalah sebesar 76.8 % dengan frekuensi 96.

Klasifikasi terakhir yaitu klasifikasi Tidak Secara Langsung ke Pihak yang Relevan dengan diksi kata *advising, combat, evaluation, precaution, prevent* dan *recommendations*. Semua diksi kata ini mewakili kewenangan yang ditargetkan untuk penanganan atau pengurangan jumlah imigran ilegal secara umum, tetapi secara tidak langsung juga ditujukan ke pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Migrasi ilegal. Persentase untuk

klasifikasi ini adalah sebesar 24.8 % dengan jumlah frekuensi 31.

Diksi kata dengan persentase terbesar yaitu *examination* sebesar 1.93 % dengan jumlah frekuensi 47, *place of refuge* sebesar 1.27 % dengan jumlah frekuensi 31 dan *prevent* sebesar 0.82 % dengan jumlah frekuensi 20. Diksi kata dengan persentase terkecil yaitu *combat* dan *reprimand* masing-masing sebesar 0.08 % dan 0.04 % dengan jumlah frekuensi 2 dan 1. Diksi kata yang tidak memiliki frekuensi yaitu *evaluation* dan *proper accommodation*.

Berdasarkan dari hasil kesimpulan ini dan ditambahkan dengan kesimpulan klasifikasi, pencegahan merupakan otoritas yang paling jarang dilaksanakan di dalam pendekatan konstruktivisme dikarenakan 2 diksi kata dari klasifikasi dengan persentase terkecil yaitu *combat* dan *evaluation* memiliki persentase terkecil. Pencegahan didefinisikan sebagai kewenangan dalam mencegah segala jenis aktivitas atau kegiatan yang berpotensi melanggar hukum secara umum dan salah satunya di dalam regulasi dijelaskan “*..formulating policies and programmes to prevent and combat trafficking in persons and smuggling of migrants...*” (UU No. 637 pasal 7 ayat (1) poin b). Otoritas dengan pendekatan konstruktivisme yang paling sering dilaksanakan adalah pemeriksaan, dikarenakan diksi kata *examination* memiliki persentase terbesar dan masuk ke dalam klasifikasi dengan persentase terbesar. Pemeriksaan didefinisikan sebagai segala proses pemeriksaan dan pengujian secara umum dan salah satunya di dalam regulasi dijelaskan “*Except with the authority of an immigration officer, no article or thing shall be removed or taken from, or put on board, any vessel until the vessel has been examined by an immigration officer...*” (UU No. 155 pasal 21 ayat (1)).

Berdasarkan dari hasil diatas, indikator otoritas didominasi oleh Pendekatan realisme dalam hal kewenangan pemberian hukuman tahanan. Indikator otoritas dalam Pendekatan liberalisme yang memiliki persentase terbesar kedua didominasi dalam hal kewenangan pemberian pembebasan bersyarat. Yang terakhir, indikator otoritas dalam Pendekatan konstruktivisme yang memiliki persentase terkecil dalam hal kewenangan pemeriksaan.

C. Analisis Indikator Sumber Anggaran Dalam Manajemen Kebijakan Penanganan Migrasi Ilegal

Indikator ketiga yang akan dianalisis adalah sumber anggaran dalam manajemen kebijakan penanganan Migrasi ilegal. Sumber anggaran mewakili sumber pendanaan dalam pelaksanaan kebijakan penanganan imigran ilegal, dimana sumber pendanaan ini bisa berasal dari pemerintah sebagai bagian dari anggaran negara mereka, pinjaman dan hibah dari organisasi nonprofit atau individu, bantuan dari luar negeri ataupun dibebankan kepada pelaku Migrasi ilegal dan yang terkait. Sumber anggaran ini kemudian dibagi ke dalam 3 pendekatan besar, yaitu realisme, liberalisme dan konstruktivisme untuk dilihat pendekatan manakah yang paling dominan dalam indikator ini. Berikut merupakan hasil analisis tabel distribusi frekuensinya.

Tabel 4.3 Hasil analisis isi indikator sumber anggaran dalam manajemen kebijakan penanganan migrasi ilegal

Pende katan	No.	Diksi Kata	Frekuensi (%)						
			Act 155	Act 150	Act 670	Immigr ation Regulat ions 1963	Immigration Detention Regulations 2003	Act 537	Act 796
REALI SME	1.	Cost of the Government	3 (3.75 %)	0	0	0	0	0	0
TOTAL			3 (3.75 %)	0	0	0	0	0	0
LIBER ALIS ME	1.	Agents	0	2 (11. 76%)	2 (14.28 %)	1 (7.69%)	0	0	0
	2.	Charterer	19 (23.75 %)	1 (5.8 8%)	0	3 (23.07%)	0	0	0
	3.	Debt	2 (2.5%)	1 (5.8 8%)	2 (14.28 %)	1 (7.69%)	0	0	0
	4.	Loan	0	0	0	0	0	0	0

	5.	Master	45 (56.25 %)	9 (52.94 %)	12 (85.71 %)	6 (46.15 %)	0	0	0
	6.	Owners	3 (3.75 %)	4 (23.53 %)	0	1 (7.69%)	0	0	0
	7.	Sell	1 (1.25 %)	0	0	0	0	2 (28.57 %)	0
	8.	Sale	5 (6.25 %)	0	0	1 (7.69%)	0	5 (71.42 %)	0
TOTAL			75 (93.75 %)	17 (100 %)	14 (100 %)	13 (100%)	0	7 (100 %)	0
KONS TRUK TIVIS ME	1.	Free of charge	2	0	0	0	0	0	0
	2.	Donation	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			2 (2.5%)	0	0	0	0	0	0
TOTAL			80 (100 %)	17 (100 %)	17 (100 %)	13 (100%)	0	7 (100 %)	0

Sumber diolah dari: Undang-Undang Imigrasi 1959/63 (UU No. 155), Undang-Undang Passport 1966 (UU No. 150), Undang-Undang Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007 (UU No. 670), Peraturan-Peraturan Migrasi 1963, UU Ketenagakerjaan 1968 (UU No. 796), Undang-Undang Penjara 1995 (UU No. 537) dan Peraturan (Administrasi dan Manajemen Depot Imigrasi) Migrasi 2003

Sebelum membahas kesimpulan, perlu diingatkan bahwa untuk indikator sumber anggaran, setelah dilakukan analisis isi, terdapat dua regulasi yang tidak memiliki frekuensi sama sekali. Dua regulasi itu adalah Peraturan Depot Imigrasi 2003 dan UU No. 796. Maka dari itu, untuk pembahasan hasil analisis selanjutnya, hanya akan digunakan lima regulasi.

Berdasarkan dari hasil tabel diatas, indikator sumber anggaran di dominasi oleh pendekatan liberalisme dimana seluruh regulasi didominasi oleh liberalisme. Persentase untuk tiap-tiap regulasi adalah UU No. 155 sebesar 93.75 % dengan jumlah frekuensi 75, UU No. 150 sebesar 100 % dengan jumlah frekuensi 17, UU No. 670 sebesar 100 % dengan jumlah frekuensi 100 %, Peraturan Migrasi 1963 sebesar 100 % dengan jumlah frekuensi 13 dan UU No. 537 sebesar 100 % dengan jumlah frekuensi 7. Keseluruhan persentase untuk pendekatan liberalisme adalah 94.02 % dengan jumlah frekuensi 126.

Penggunaan diksi kata untuk pendekatan ini menggunakan 8 diksi kata. Diksi kata yang memiliki persentase terbesar adalah *master* sebesar 53.73 % dengan jumlah frekuensi 72 dan *charterer* sebesar 17.16 % dengan jumlah frekuensi 23. Diksi kata yang memiliki persentase terkecil adalah *sell* sebesar 2.28 % dengan jumlah frekuensi 3. Diksi kata yang tidak memiliki frekuensi adalah *loan*.

Berdasarkan dari hasil kesimpulan ini, sumber anggaran dengan pendekatan liberalisme paling berasal dari *sell*. *Sell* didefinisikan sebagai hasil penjualan dari barang-barang tertentu yang merupakan hasil sitaan dan dijual oleh pemerintah untuk menutupi biaya terkait dalam perkara Migrasi ilegal. Selengkapnya tentang *sell* dijelaskan di dalam UU No. 155 pasal 49A ayat (6) yang berbunyi “*The Director General may sell any vessel, vehicle or aircraft forfeited under this section. The proceeds of the sale shall, after payment of the expenses of*

the sale, be applied in payment of any fine, costs, or charge incurred under this Act and any balance remaining shall be paid into the Consolidated Fund.” (UU No. 155 pasal 49A ayat (6)). Sumber anggaran dengan pendekatan liberalisme yang paling banyak berasal dari *master*. Diksi kata *master* bermakna seseorang yang bertanggung jawab penuh atas sebuah transportasi. Transportasi disini merujuk ke transportasi pembawa imigran masuk ke Malaysia, dan jika ada transportasi yang membawa masuk imigran ilegal, maka pemilik dari transportasi tersebut harus membayar semua biaya pengurusan dan penanganan imigran ilegal tersebut. Lebih lengkapnya dijelaskan di dalam UU No. 155 pasal 47 yang berbunyi:

“If any person— (a) enters Malaysia from any vessel or aircraft contrary to this Act; or (b) disembarks from any vessel or aircraft on which he has been re-embarked or to which he has been returned under section 19, 20 or 24, the master or captain and the owner, charterer and agent thereof shall be jointly and severally liable for all expenses incurred by the Government in respect of the detention and maintenance of that person and his removal from Malaysia and such expenses shall be recoverable as a debt due to Government from the master or captain and the owner, charterer and agent of the vessel or aircraft jointly and severally.”

Indikator sumber anggaran dengan pendekatan realisme adalah pendekatan dengan persentase terbesar kedua dimana hanya satu regulasi yang memiliki frekuensinya yaitu UU No. 155 dengan persentase sebesar 3.75 % dengan jumlah frekuensi 3. Pendekatan ini hanya memiliki satu diksi kata yaitu *cost of the government* dengan persentase sebesar 2.28 % dan jumlah frekuensi 3. *Cost of the government* mengarah ke biaya yang ditanggung pemerintah, khususnya dalam pembiayaan untuk repatriasi imigran ilegal yang akan kembali ke negara asalnya, dengan catatan imigran ilegal tidak mampu

dirinya sendiri. Salah satu pernyataan di dalam UU No. 155 ayat (1) menjelaskan tentang hal ini juga yang berbunyi “...*may apply to the Director General for the repatriation of himself and his family (if any) at the cost of the Government.*”

Indikator sumber anggaran dengan pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan dengan persentase terkecil dimana hanya satu regulasi yang memiliki frekuensinya, yaitu UU No. 155 dengan persentase sebesar 1.49 % dengan jumlah frekuensi 2. Pendekatan ini memiliki dua diksi kata, yaitu *free of charge* dengan persentase sebesar 1.49 % dan jumlah frekuensi 2, serta *donation* tidak memiliki frekuensi. Karena *donation* tidak memiliki frekuensi, jadi tidak akan penjelasannya. *Free of charge* sendiri mengarah ke pembiayaan gratis untuk imigran ilegal yang akan kembali negara asalnya dengan menggunakan transportasi yang sama saat dia masuk ke Malaysia, dimana pembiayaan gratis ini dibebankan kepada pemilik transportasi. Selengkapnya bisa dilihat di dalam UU No. 155 pasal 48 ayat (1) yang berbunyi:

“Where a person has been ordered to be removed under this Act and such person was brought to Malaysia in a vessel or an aircraft, the master, captain, owner, charterer or agent of the vessel or aircraft, as the case may be, shall, if required in writing by the Director General, afford that person free of charge a passage on any vessel or aircraft to the port or place at which he embarked and proper accommodation and maintenance during the voyage or flight...”

Jadi, indikator sumber anggaran didominasi oleh pendekatan liberalisme dengan pemilik transportasi pembawa imigran ilegal sebagai sumber pendanaan utama. Pendekatan yang kedua adalah realisme dengan sumber pendanaan dari pemerintah khusus untuk repatriasi dan yang terakhir adalah pendekatan konstruktivisme dengan

pembiayaan gratis bagi imigran ilegal untuk kembali ke negara asalnya dan dibebankan kepada pemilik transportasi.

D. Indikator Analisis Tata Kelola Dalam Manajemen Kebijakan Penanganan Migrasi Ilegal

Indikator keempat yang akan dianalisis selanjutnya adalah indikator tata kelola dalam manajemen kebijakan penanganan migrasi ilegal. Tata kelola mewakili *frameworks* besar yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan penanganan imigran ilegal di Malaysia. Tata kelola itu kemudian dibagi ke dalam 3 pendekatan besar yaitu realisme, liberalisme dan konstruktivisme untuk dicari tahu pendekatan mana yang paling dominan. Berikut merupakan analisis tabel distribusi frekuensinya.

Tabel 4.4 Hasil analisis isi indikator tata kelola dalam manajemen kebijakan penanganan migrasi ilegal

Pendekatan	No.	Diksi Kata	Frekuensi (%)						
			Act 155	Act 150	Act 670	Immigration Regulations 1963	Immigration Detention Regulations 2003	Act 537	Act 796
REALIS ME	1.	Code	12 (6.21 %)	3 (8.57 %)	6 (2.72 %)	1 (0.74%)	0	4 (2.07 %)	0
	2.	Control	11 (5.69 %)	1 (2.85 %)	8 (3.63 %)	1 (0.74%)	1 (2.08%)	11 (5.69 %)	1 (1.78 %)
	3.	Dangerous to the community	1 (0.51 %)	0	0	0	0	0	0
	4.	Federal territory	3 (1.55 %)	3 (8.57 %)	0	0	0	6 (3.10 %)	0
	5.	Legislation	11 (5.69 %)	0	1 (0.45 %)	0	0	2 (1.03 %)	0
	6.	Liability	3 (1.55 %)	0	5 (2.27 %)	5 (3.70%)	0	2 (1.03 %)	0

7.	Operation	10 (5.18 %)	0	4 (1.81 %)	0	1 (2.08%)	6 (3.10 %)	1 (1.78 %)
8.	Order	67 (34.71 %)	17 (48.57 %)	45 (20.45 %)	13 (9.62%)	6 (12.5%)	86 (44.55 %)	7 (12.5 %)
9.	Ordinance	9 (4.66 %)	0	2 (0.90 %)	38 (28.14%)	0	13 (6.73 %)	3 (7.14 %)
10.	Power	28 (14.50 %)	9 (25.71 %)	14 (6.36 %)	2 (1.48%)	0	12 (6.21 %)	2 (3.57 %)
11.	Punishment	4 (2.07 %)	0	2 (0.90 %)	0	16 (33.33%)	5 (2.59 %)	0
12.	Provision	12 (6.21 %)	0	2 (0.90 %)	1 (0.74%)	0	2 (1.03 %)	6 (10.71 %)
13.	Regulation	4 (2.07 %)	0	1 (0.45 %)	62 (45.92%)	4 (8.33%)	0	1 (1.78 %)
14.	Restriction	4 (2.07 %)	0	2 (0.90 %)	0	0	0	15 (26.78 %)
15.	Severe	0	0	1 (0.45 %)	0	0	0	0

	16.	Territorial	1 (0.51 %)	1 (2.85 %)	2 (0.45 %)	0	0	0	0
	17.	Use of force	3 (1.55 %)	0	1 (0.90 %)	0	0	0	0
TOTAL			183 (94.81 %)	34 (83.67 %)	88 (40%)	123 (91.11%)	28 (58.33%)	149 (77.20 %)	36 (64.28 %)
LIBERA LISME	1.	Admissibility	2 (1.03 %)	0	8 (3.63 %)	0	0	0	0
	2.	Business	1 (0.51 %)	1 (2.85 %)	0	6 (4.44%)	0	0	11 (19.64 %)
	3.	Fitness of the detainee	0	0	0	0	1 (2.08%)	0	0
	4.	Freedom	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Guarantee of rights	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Immunity	0	0	4 (1.81 %)	0	0	0	0
	7.	Indemnity	0	0	2 (0.90 %)	0	0	0	0
	8.	Pecuniary	0	0	0	0	0	2 (1.03 %)	0

	9.	Private	0	0	1 (0.45 %)	0	0	0	1 (1.78 %)
	10.	Property	2 (1.03 %)	0	28 (12.72 %)	1 (0.74%)	4 (8.33%)	5 (2.59 %)	0
	11.	Proper implementat ion	0	0	1 (0.45 %)	0	0	0	0
	12.	Protection	2 (1.03 %)	0	53 (24.09 %)	0	0	2 (1.03 %)	0
	13.	Protective	0	0	1 (0.45 %)	0	0	0	0
	14.	Reduction	0	0	0	0	0	2 (1.03 %)	0
	15.	Respite	0	0	0	0	0	1 (0.51 %)	0
	16.	Safety	0	0	1 (0.45 %)	0	0	2 (1.03 %)	0
TOTAL			7 (3.62 %)	1 (2.85 %)	99 (45%)	7 (5.18%)	5 (10.41%)	15 (7.77 %)	12 (21.42 %)

KONSTRUKTIVISME	1.	Care	0	0	10 (4.54%)	0	1 (2.08%)	0	0
	2.	Cleanliness	0	0	0	0	1 (2.08%)	0	0
	3.	Community	0	0	2 (0.90%)	0	0	4 (2.07%)	0
	4.	Dangerous to the health or life	0	0	0	0	1 (2.08%)	0	0
	5.	Developments at the international level	0	0	1 (0.45%)	0	0	0	0
	6.	Diplomatic	1 (0.51%)	0	0	0	0	0	7 (12.5%)
	7.	Discipline	0	0	0	0	8 (16.66%)	9 (4.66%)	0
	8.	Good order	0	0	0	0	1 (2.08%)	1 (0.51%)	0
	9.	Ethical code	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Morality	1 (0.51%)	0	0	0	0	0	0
	11.	Religious	0	0	0	1 (0.74%)	1 (2.08%)	0	0

	12.	Responsibility	0	0	4 (1.81%)	2 (1.48%)	0	5 (2.59%)	1 (1.78%)
	13.	Treatment	1 (0.51%)	0	16 (7.27%)	2 (1.48%)	2 (4.16%)	10 (5.18%)	0
TOTAL			3 (1.55%)	0	33 (15%)	5 (3.70%)	15 (31.25%)	29 (15.02%)	8 (14.28%)
TOTAL			193 (100%)	35 (100%)	220 (100%)	135 (100%)	48 (100%)	193 (100%)	56 (100%)

Sumber diolah dari: Undang-Undang Imigrasi 1959/63 (UU No. 155), Undang-Undang Passport 1966 (UU No. 150), Undang-Undang Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007 (UU No. 670), Peraturan-Peraturan Migrasi 1963, UU Ketenagakerjaan 1968 (UU No. 796), Undang-Undang Penjara 1995 (UU No. 537) dan Peraturan (Administrasi dan Manajemen Depot Imigrasi) Migrasi 2003

Berdasarkan dari hasil tabel analisa diatas, indikator tata kelola didominasi oleh pendekatan realisme dengan enam dari tujuh regulasi yang dianalisis didominasi oleh realisme. Persentase untuk tiap-tiap regulasi yaitu UU No. 155 sebesar 94.81 % dengan jumlah frekuensi 183, UU No. 150 sebesar 83.67 % dengan jumlah frekuensi 34, Peraturan Migrasi 1963 sebesar 91.11 % dengan jumlah frekuensi 123, Peraturan Depot Imigrasi 2003 sebesar 58.33 % dengan jumlah frekuensi 28, UU No. 537 sebesar 77.20 % dengan jumlah frekuensi 149, UU No. 796 sebesar 64.28 % dengan jumlah frekuensi 36 dan UU 670, regulasi yang tidak didominasi oleh realisme, sebesar 40 % dengan jumlah frekuensi 88. Keseluruhan persentase untuk pendekatan realisme adalah sebesar 72.84 % dengan jumlah frekuensi 641.

Pemilihan diksi kata untuk pendekatan realisme berjumlah 17 diksi kata dan dibagi ke dalam tiga klasifikasi. Klasifikasi tersebut yaitu Peraturan, Kekuatan dan Kedaulatan.

Klasifikasi dengan persentase terbesar adalah Kekuatan dengan diksi kata *control, liability, operation, order, power, punishment, restriction, severe* dan *use of force*. Semua diksi kata ini mewakili penggunaan kekuatan dan paksaan sebagai tata kelola dalam penanganan imigran ilegal. Persentase untuk klasifikasi ini adalah 66.92 % dengan jumlah frekuensi 429.

Klasifikasi kedua dengan persentase terbesar adalah Peraturan dengan diksi kata *code, legislation, ordinance, provision* dan *regulation*. Semua diksi kata ini mewakili penggunaan peraturan regulasi formal sebagai tata kelola penanganan imigran ilegal. Persentase untuk klasifikasi ini adalah sebesar 31.20 % dengan jumlah frekuensi 200. Klasifikasi terakhir adalah Kedaulatan dengan diksi kata *dangerous to the community, federal territory* dan *territorial*. Semua diksi kata ini mewakili kedaulatan di

dalam kehidupan masyarakat dan teritorial Malaysia sebagai tata kelola dalam penanganan imigran ilegal. Persentase untuk klasifikasi ini adalah sebesar 2.65 % dengan jumlah frekuensi 17.

Diksi kata dengan persentase terbesar yaitu *order* sebesar 26.81 % dengan jumlah frekuensi 236, *regulation* sebesar 8.18 % dengan jumlah frekuensi 72 dan *power* sebesar 7.61 % dengan jumlah frekuensi 67. Diksi kata dengan persentase terkecil yaitu *dangerous to the community* dan *severe* sebesar 0.11 % dengan jumlah frekuensi 1.

Berdasarkan dari hasil kesimpulan ini dan ditambahkan dengan kesimpulan klasifikasi, penggunaan kedaulatan di dalam masyarakat domestik merupakan tata kelola yang paling jarang dalam pendekatan realisme. Hal ini dikarenakan diksi kata *dangerous to the community* memiliki persentase terkecil dan diksi kata itu masuk kedalam klasifikasi dengan persentase terkecil. Kedaulatan dalam hal ini ialah adanya ancaman terhadap penyakit berbahaya yang menular atau penyakit jiwa yang dapat mengganggu keselamatan dalam masyarakat. Lebih lengkapnya bisa dilihat di dalam UU No 155 pasal 8 ayat (3) poin b yang berbunyi “...*any person suffering from mental disorder or being a mental defective, or suffering from a contagious or infectious disease which makes his presence in Malaysia dangerous to the community...*” Penggunaan kekuatan dalam bentuk perintah adalah tata kelola yang dominan dalam pendekatan realisme. Hal ini karena diksi kata *order* memiliki persentase terbesar dan masuk ke dalam klasifikasi dengan persentase terbesar. *Order* didefinisikan sebagai perintah, dalam hal ini perintah atasan kepada bawahan ataupun pihak yang berwenang kepada pihak yang dibebani tanggung jawab untuk melaksanakan perintah terkait kebijakan penanganan imigran ilegal. Bentuk tata kelola ini salah satunya bisa dilihat di dalam UU No. 155 pasal 49 ayat (4)

yang berbunyi “*If default is made in the payment of any such fine, costs or charges the Port Officer may seize the vessel and the vessel shall be declared forfeited to the Government by order of a court upon the application of the Attorney General. Any vessel so forfeited shall be sold.*”.

Indikator tata kelola dengan pendekatan liberalisme memiliki persentase terbesar kedua dimana satu dari tujuh regulasi didominasi oleh liberalisme. Regulasi tersebut ialah UU No. 670 dengan persentase 45 % dan jumlah frekuensi 99. Persentase regulasi lainnya yaitu UU No. 155 sebesar 3.62 % dengan jumlah frekuensi 7, UU No. 150 sebesar 2.85 % dengan jumlah frekuensi 1, Peraturan Migrasi 1963 sebesar 5.18 % dengan jumlah frekuensi 7, Peraturan Depot Imigrasi 2003 sebesar 10.41 % dengan jumlah frekuensi 5, UU No. 537 sebesar 7.77 % dengan jumlah frekuensi 15 dan UU No. 796 sebesar 21.42 % dengan jumlah frekuensi 12. Keseluruhan persentase untuk liberalisme adalah 16.59 % dengan jumlah frekuensi 146.

Pemilihan diksi kata untuk pendekatan liberalisme berjumlah 16 diksi kata dengan tiga klasifikasi yaitu, Finansial, Penjaminan dan Perlindungan dan Pengurangan Hukuman.

Klasifikasi dengan persentase terbesar adalah Penjaminan dan Perlindungan dengan diksi kata *admissibility, fitness of the detainee, freedom, guarantee of rights, immunity, protection, protective, safety* dan *private*. Semua diksi kata ini mewakili penjaminan dan perlindungan keselamatan, kebebasan, privasi dan hak lainnya dari pelaku yang terlibat di dalam perkara Migrasi ilegal. Keseluruhan persentase untuk klasifikasi ini adalah sebesar 53.42 % dengan jumlah frekuensi 78.

Klasifikasi kedua dengan persentase terbesar adalah Finansial dengan diksi kata *business, indemnity, pecuniary*

dan *property*. Semua diksi kata ini mewakili tata kelola yang berhubungan dengan materiil. Keseluruhan persentase untuk klasifikasi ini adalah sebesar 43.15 % dengan jumlah frekuensi 63.

Klasifikasi terakhir dengan persentase terkecil adalah Pengurangan dengan diksi kata *proper implementation, reduction* dan *respite*. Semua diksi kata ini mewakili pengurangan dan peringanan hukuman, walaupun diksi kata dalam klasifikasi ini masih bersifat umum. Keseluruhan persentase untuk klasifikasi ini adalah 2.73 % dengan jumlah frekuensi 4.

Diksi kata dengan persentase terbesar adalah *protection* sebesar 6.47 % dengan jumlah frekuensi 57, *property* sebesar 4.54 % dengan jumlah frekuensi 40 dan *business* sebesar 2.15 % dengan jumlah frekuensi 19. Diksi kata dengan persentase terkecil adalah *fitness of the detainee, protective* dan *respite* sebesar 0.11 % dengan jumlah frekuensi 1. Diksi kata yang tidak memiliki frekuensi adalah *freedom* dan *guarantee of rights*.

Berdasarkan dari hasil kesimpulan ini dan ditambahkan dengan kesimpulan klasifikasi, penjaminan adalah tata kelola yang paling jarang dilaksanakan, dimana penjaminan disini lebih dispefikasi ke dalam bentuk kesehatan. Hal ini dikarenakan diksi kata *fitness of the detainee* memiliki persentase terkecil dan diksi kata *protective* memiliki makna yang sama dengan diksi kata *protection* yang memiliki persentase terbesar. Penjaminan merujuk kepada pelaku yang ditahan di dalam penjara dan Depot Imigrasi bagi pihak-pihak yang tertangkap dan dinyatakan bersalah dalam perkara migrasi ilegal. Tata kelola lebih lanjut bisa dilihat di dalam Peraturan Depot Imigrasi 2003 pasal 22 ayat (1) yang berbunyi (1) "*Every detainee ordered to undergo the punishment of confinement on a restricted diet shall be examined by a medical officer before the punishment is carried out and*

the medical officer shall certify as to the fitness of the detainee to undergo such punishment.”.

Perlindungan merupakan tata kelola yang paling sering dilaksanakan dalam pendekatan liberalisme. Hal ini dikarenakan diksi *protection* memiliki persentase terbesar. Perlindungan disini dimaksudkan sebagai perlindungan keselamatan bagi pelaku dalam perkara Migrasi ilegal, terutama imigran ilegal sebagai hasil dalam perdagangan dan penyelundupan ilegal maupun pengungsi, yang berada di penjara dan Depot Imigrasi. Contoh tata kelola perlindungan bisa dilihat di dalam UU No. 670 pasal 42 ayat (1) yang berbunyi “*The Minister may, declare any house, building or place, or any part thereof, to be a place of refuge for the care and protection of trafficked persons and may, in like manner, declare that such place of refuge ceases to be a place of refuge.”.* Walaupun kedua tata kelola yang disebutkan berada di dalam klasifikasi dengan persentase terbesar, tetapi karena kedua tata kelola berada di dalam klasifikasi yang sama dan adanya kontras jumlah frekuensi antara masing-masing diksi kata mengakibatkan jumlah persentase diksi kata menjadi pertimbangan lebih kuat dalam menentukan mana yang dominan dan yang tidak.

Indikator tata kelola dengan pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan dengan persentase terkecil. Persentase untuk tiap-tiap regulasi adalah UU No. 155 sebesar 1.55 % dengan jumlah frekuensi 3, UU No. 670 sebesar 15 % dengan jumlah frekuensi 33, Peraturan Migrasi 1963 sebesar 3.70 % dengan jumlah frekuensi 5, Peraturan Depot Imigrasi 2003 sebesar 31.25 % dengan jumlah frekuensi 15, UU No. 537 sebesar 15.02 % dengan jumlah frekuensi 29, UU No. 796 sebesar 14.28 % dengan jumlah frekuensi 8 dan UU No. 150 tidak memiliki frekuensi. Keseluruhan untuk pendekatan ini adalah 10.56 % dengan jumlah frekuensi 93.

Pemilihan diksi kata untuk pendekatan konstruktivisme berjumlah 13 dengan tiga klasifikasi, yaitu Pemeliharaan, Prinsip dan Internasionalisasi.

Klasifikasi dengan persentase terbesar adalah Pemeliharaan dengan diksi kata *care*, *cleanliness*, *treatment* dan *dangerous to the health or life*. Semua diksi kata ini mewakili pemeliharaan dan perawatan, khususnya kesehatan bagi para pelaku dalam perkara Migrasi ilegal. Persentase untuk klasifikasi ini adalah sebesar 47.31 % dengan jumlah frekuensi 44.

Klasifikasi dengan persentase terbesar kedua adalah Prinsip dengan diksi kata *community*, *discipline*, *good order*, *ethical code*, *morality*, *religious* dan *responsibility*. Semua diksi kata ini mewakili pemakaian prinsip dan norma yang berkembang dan berlaku di masyarakat setempat sebagai tata kelola dalam kebijakan penanganan imigran ilegal di Malaysia. Persentase untuk klasifikasi ini adalah sebesar 43.01 % dengan jumlah frekuensi 40 %.

Klasifikasi dengan persentase terkecil adalah Internasionalisasi dengan diksi kata *diplomatic* dan *developments at the international level*. Semua diksi kata ini mewakili adanya usaha pengubahan isu imigran ilegal di Malaysia menjadi isu internasional. Persentase untuk klasifikasi ini adalah sebesar 9.67 % dengan jumlah frekuensi 9.

Diksi kata dengan persentase terbesar adalah *treatment* sebesar 3.52 % dengan jumlah frekuensi 31, *discipline* sebesar 1.93 % dengan jumlah frekuensi 17 dan *responsibility* sebesar 1.36 % dengan jumlah frekuensi 12. Diksi kata dengan persentase terkecil adalah *cleanliness*, *dangerous to the health or life*, *developments at the international level* dan *morality*. Diksi kata yang tidak memiliki frekuensi adalah *ethical code*.

Berdasarkan dari hasil kesimpulan ini dan ditambahkan dengan kesimpulan klasifikasi, pemeliharaan merupakan tata kelola yang paling sering dilaksanakan di dalam pendekatan konstruktivisme. Hal ini dikarenakan diksi kata *treatment* memiliki persentase kata terbesar dan berada dalam klasifikasi dengan persentase terbesar. Pemeliharaan disini dimaksudkan sebagai pemeliharaan dan perawatan kesehatan bagi para pelaku dalam perkara Migrasi, terutama bagi imigran ilegal. Salah satu penjelasan tentang pemeliharaan dapat dilihat di dalam UU No. 670 pasal 47 yang berbunyi “*Where a person taken into temporary custody under subsection 44(1) is a child and the medical officer who examines him is of the opinion that his hospitalization is necessary for the purpose of medical care or treatment, an enforcement officer may authorise that person to be hospitalised*”.

Internasionalisasi merupakan tata kelola yang paling jarang dilaksanakan di dalam pendekatan konstruktivisme. Hal ini dikarenakan diksi kata *diplomatic* dan klasifikasi dimana diksi kata tersebut berada memiliki persentase terkecil. Internasionalisasi disini kemudian mengarah ke hal yang dinasehatkan kepada pemerintah Federal dan Negara Bagian oleh Dewan Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Imigran. Penjelasan ini bisa dilihat di dalam UU No. 670 pasal 7 ayat (1) poin f yang berbunyi “*advising the Government on the issues of trafficking in persons and smuggling of migrants including developments at the international level against trafficking in persons and smuggling of migrants*”.

Sebelum berlanjut ke kesimpulan akhir, perlu dibahas mengenai regulasi yang didominasi oleh liberalisme untuk menentukan pendekatan realisme sebagai pendekatan dominan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ada satu dari tujuh regulasi yang didominasi oleh pendekatan liberalisme, yaitu UU No. 670. Tetapi, jika dibandingkan jumlah regulasi yang didominasi oleh

pendekatan realisme yang berjumlah enam dan jumlah regulasi yang didominasi oleh pendekatan liberalisme yang berjumlah satu, maka kemudian bisa disimpulkan bahwa indikator tata kelola didominasi oleh pendekatan realisme dengan perbandingan regulasi enam banding satu.

Jadi, indikator tata kelola didominasi oleh pendekatan realisme dengan tata kelola penggunaan kekuatan. Pendekatan liberalisme memiliki persentase terbesar kedua dengan tata kelola perlindungan dan terakhir, pendekatan konstruktivisme dengan tata kelola pemeliharaan.

E. Analisis Indikator Output Dalam Manajemen Kebijakan Penanganan Migrasi Ilegal

Indikator terakhir yang akan dianalisis ialah indikator output dalam manajemen kebijakan penanganan Migrasi ilegal. Output mewakili luaran, tujuan dan target yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan penanganan imigran ilegal di Malaysia. Output ini kemudian dibagi kedalam tiga pendekatan besar yaitu realisme, liberalisme dan konstruktivisme untuk ditentukan pendekatan apa yang paling dominan dalam indikator ini. Berikut ini merupakan hasil analisa tabel distribusi frekuensinya.

Tabel 4.5 Hasil analisis isi indikator output dalam manajemen kebijakan penanganan migrasi ilegal

Pendekatan	No.	Diksi Kata	Frekuensi (%)						
			Act 155	Act 150	Act 670	Immigration Regulations 1963	Immigration Detention Regulations 2003	Act 537	Act 796
REALISME	1.	Public order	1 (3.57%)	0	0	0	0	0	0
	2.	Stability	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Security	16 (57.14%)	1 (33.33%)	4 (19.04%)	30 (90.90%)	1 (14.28%)	1 (20%)	0
TOTAL			17 (60.71%)	1 (100%)	4 (19.04%)	30 (90.90%)	1 (14.28%)	1 (16.66%)	0
LIBERALISME	1.	Citizen's right	2 (7.14%)	0	0	0	0	0	0
	2.	Convenience	0	0	0	0	0	1 (10%)	0

	3.	Economic	2 (7.14 %)	0	0	0	0	0	0
	4.	Equality	0	0	1 (4.76 %)	0	0	1 (10%)	0
	5.	Industrial	2 (7.14 %)	0	0	0	0	0	0
	6.	Interest of the trafficked person	0	0	2 (9.52 %)	0	0	0	0
	7.	Peace	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Prosperity	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Public health	1 (3.57 %)	0	0	0	0	0	0
TOTAL			7 (25%)	0	3 (14.28 %)	0	0	2 (33.33 %)	0
KONST RUKTIV ISME	1.	Community Developme nt	0	0	2 (9.52 %)	0	0	0	0
	2.	Educational	2 (7.14 %)	0	0	0	0	0	0

	3.	Foreign mission	0	0	0	0	4 (57.14%)	0	0
	4.	Good order	0	0	0	0	1 (14.28%)	1 (10%)	0
	5.	Public awareness	0	0	1 (4.76 %)	0	0	0	0
	6.	Social	2 (7.14 %)	0	5 (23.80 %)	3 (9.09%)	0	0	0
	7.	Social justice	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Welfare	0	0	6 (28.57 %)	0	1 (14.28%)	2 (20%)	0
TOTAL			4 (14.28 %)	0	14 (66.66 %)	3 (9.09%)	6 (85.71%)	3 (50%)	0
TOTAL			28 (100 %)	1 (100 %)	21 (100 %)	33 (100%)	7 (100%)	6 (100 %)	0

Sumber diolah dari: Undang-Undang Imigrasi 1959/63 (UU No. 155), Undang-Undang Passport 1966 (UU No. 150), Undang-Undang Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007 (UU No. 670), Peraturan-Peraturan Migrasi 1963, UU Ketenagakerjaan 1968 (UU No. 796), Undang-Undang Penjara 1995 (UU No. 537) dan Peraturan (Administrasi dan Manajemen Depot Imigrasi) Migrasi 2003

Sebelum membahas tentang kesimpulan dari tabel analisis diatas, perlu diketahui bahwa terdapat satu regulasi yang tidak memiliki frekuensi. Regulasi tersebut adalah UU No. 796. Maka dari itu, untuk pembahasan kesimpulan selanjutnya akan digunakan enam regulasi.

Berdasarkan dari hasil analisis tabel diatas, pendekatan yang memiliki persentase terbesar dalam indikator output adalah realisme dimana tiga dari enam regulasi yang dianalisis didominasi oleh realisme. Persentase ketiga regulasi tersebut ialah UU No. 155 sebesar 60.71 % dengan jumlah frekuensi 17, UU No. 150 sebesar 100 % dengan jumlah frekuensi 1 dan Peraturan Migrasi 1963 sebesar 90.90 % dengan jumlah frekuensi 30. Persentase regulasi lainnya yang tidak didominasi oleh realisme ialah UU No. 670 sebesar 19.04 % dengan jumlah frekuensi 4, Peraturan Depot Imigrasi 2003 sebesar 14.28 % dengan jumlah frekuensi 1 dan UU No. 537 sebesar 16.66 % dengan jumlah frekuensi 1. Keseluruhan persentase untuk pendekatan realisme adalah 56.25 % dengan jumlah frekuensi 54.

Pemilihan diksi kata untuk pendekatan realisme berjumlah 3 diksi kata. Diksi kata yang memiliki persentase terbesar adalah *security* sebesar 55.20 % dengan jumlah frekuensi 53, diksi kata dengan persentase terkecil adalah *public order* sebesar 1.04 % dengan jumlah frekuensi 1 dan diksi kata yang tidak memiliki frekuensi adalah *stability*.

Berdasarkan dari hasil kesimpulan ini, output yang paling sedikit diharapkan dalam pendekatan realisme adalah *public order*. *Public order* bermakna ketertiban dan keteraturan di dalam kehidupan masyarakat domestik secara luas. Penggunaan *public order* bisa dilihat dalam UU No. 155 pasal 9 ayat (1) poin c yang berbunyi "...cancel any Permit at any time by writing under his hand, if he is satisfied that the presence in, or entry into, Malaysia of the holder of any Permit is, or would be,

prejudicial to public order, public security, public health or morality in Malaysia or any part thereof...”.

Keamanan merupakan output yang paling banyak diharapkan dalam pendekatan realisme. Keamanan didefinisikan sebagai situasi aman dengan minimal atau tanpa adanya suatu ancaman di dalam kehidupan masyarakat domestik. Salah satu contoh penggunaan diksi kata ini terdapat dalam UU No. 155 pasal 70 ayat (6) yang berbunyi “*A person who has left an East Malaysian State on or after Malaysia Day shall not be entitled in the State to the benefit of this section if the Minister is satisfied that his residence in the State would be prejudicial to public security.*”

Indikator output dengan pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan dengan persentase terbesar kedua dimana tiga dari enam regulasi yang dianalisis didominasi oleh konstruktivisme. Persentase ketiga regulasi tersebut adalah UU No. 670 sebesar 66.66 % dengan jumlah frekuensi 14, Peraturan Depot Imigrasi 2003 sebesar 85.71 % dengan jumlah frekuensi 6 dan UU No. 537 sebesar 50 % dengan jumlah frekuensi 3. Persentase regulasi lainnya yang tidak didominasi oleh konstruktivisme adalah UU No. 155 sebesar 14.28 % dengan jumlah frekuensi 4, Peraturan Migrasi 1963 sebesar 9.09 % dengan jumlah frekuensi 3 dan UU No. 150 tidak memiliki frekuensi. Keseluruhan persentase untuk pendekatan konstruktivisme adalah sebesar 31.25 % dengan jumlah frekuensi 30.

Pemilihan diksi kata untuk indikator konstruktivisme berjumlah 8 diksi kata. Diksi kata dengan persentase terbesar adalah *social* sebesar 10.41 % dengan jumlah frekuensi 10 dan *welfare* sebesar 9.37 dengan jumlah frekuensi 9. Diksi kata dengan persentase terkecil adalah *public awareness* sebesar 1.04 % dengan jumlah frekuensi 1. Diksi kata yang tidak memiliki frekuensi adalah *social justice*. Berdasarkan dari kesimpulan ini,

output yang paling sedikit diharapkan di dalam pendekatan konstruktivisme adalah kesadaran publik. Kesadaran publik dalam hal ini bermakna kesadaran publik tentang penyebab dan konsekuensi dari adanya perdagangan manusia dan penyelundupan imigran. Kesadaran publik lebih lengkapnya dijelaskan di dalam UU No. 670 pasal 7 ayat 1 poin d yang berbunyi “...*initiating education programmes to increase public awareness of the causes and consequences of the act of trafficking in persons and smuggling of migrants...*”.

Output yang paling banyak diharapkan di dalam pendekatan konstruktivisme adalah kesejahteraan sosial. Hal ini bisa dilihat dari dua diksi kata, *social* yang bermakna sosial secara umum dan *welfare* yang berarti kesejahteraan yang memiliki persentase terbesar. Kesejahteraan sosial disini dimaksudkan bisa terhadap kesejahteraan masyarakat domestik Malaysia maupun terhadap kesejahteraan pelaku dalam kasus Migrasi ilegal, terutama imigran ilegal. Salah satu contoh penjelasan dari output ini bisa dilihat di dalam UU No. 155 pasal 9 ayat (1) poin a yang berbunyi:

“Notwithstanding anything contained in this Act or in any subsidiary legislation made under this Act, the Director General may— (a) where he deems it expedient to do so in the interests of public security or by reason of any economic, industrial, social, educational or other conditions in Malaysia...” dan UU No. 670 pasal 43 ayat (1) yang berbunyi:

“The Minister, after consultation with the Minister charged with the responsibility for women, family and community development may appoint such number of Social Welfare Officers or any other public officers to exercise the powers and perform the duties of a Protection Officer under this Act subject to any condition as may be specified”.

Pendekatan dengan persentase terkecil adalah pendekatan liberalisme dimana hanya tiga dari enam regulasi yang memiliki frekuensi. Persentase tiap-tiap regulasi tersebut adalah UU No. 155 sebesar 25 % dengan jumlah frekuensi 7, UU No. 670 sebesar 14.28 % dengan jumlah frekuensi 3 dan UU No. 537 sebesar 33.33 % dengan jumlah frekuensi 2. Keseluruhan persentase untuk pendekatan ini adalah sebesar 12.5 % dengan jumlah frekuensi 12.

Diksi kata dengan persentase terbesar adalah *citizen's right, economic, equality, industrial* dan *interest of the trafficked person* sebesar 2.08 % dengan jumlah frekuensi 2. Diksi kata dengan persentase terkecil adalah *convenience* dan *public health* sebesar 1.04 % dengan jumlah frekuensi 1. Diksi kata yang tidak memiliki frekuensi adalah *peace* dan *prosperity*. Berdasarkan dari hasil kesimpulan ini, output yang paling sering diharapkan adalah hak-hak masyarakat, ekonomi, persamaan, industri dan kepentingan imigran ilegal, terutama bagi korban perdagangan manusia yang menjadi imigran ilegal di Malaysia. Penjelasan lebih lanjut tentang output ini bisa dilihat lebih lanjut di dalam UU No. 155 pasal 9 ayat (1) poin a yang berbunyi:

“Notwithstanding anything contained in this Act or in any subsidiary legislation made under this Act, the Director General may— (a) where he deems it expedient to do so in the interests of public security or by reason of any economic, industrial, social, educational or other conditions in Malaysia...” dan UU No. 670 pasal 53 ayat (5) yang berbunyi *“After hearing the application and having read the report of the Protection Officer, and if the Magistrate is satisfied that it is in the best interest of the trafficked person...”*.

Output yang paling jarang diharapkan adalah kenyamanan dan kesehatan umum. Hal ini dikarenakan diksi kata *convenience* dan *public health* memiliki

persentase terkecil. Penjelasan mengenai output ini bisa dilihat di dalam UU No. 155 pasal 9 ayat (1) poin c yang berbunyi:

“cancel any Permit at any time by writing under his hand, if he is satisfied that the presence in, or entry into, Malaysia of the holder of any Permit is, or would be, prejudicial to public order, public security, public health or morality in Malaysia or any part thereof.” dan UU No. 537 pasal 61 poin c yang berbunyi *“procuring comforts, convenience and other benefits, which are not chargeable to public revenue, for prison officers, former prison officers who have retired on pension, gratuity or allowance or persons who were wholly or partially dependent on deceased prison officers or former prison officers at the time of their death”*.

Jadi, indikator output didominasi oleh pendekatan realisme output keamanan. Pendekatan konstruktivisme memiliki persentase terbesar kedua dengan output kesejahteraan sosial. Pendekatan terakhir dengan persentase terkecil yaitu liberalisme dengan output hak-hak masyarakat, ekonomi, persamaan, industri dan kepentingan imigran ilegal.

F. Hasil Akumulatif Indikator Dalam Manajemen Kebijakan Penanganan Migrasi Ilegal

Kelima indikator yang dianalisis telah menunjukkan hasilnya. Empat dari indikator didominasi oleh pendekatan realisme yaitu indikator aktor dengan persentase sebesar 96.63 %, indikator otoritas dengan persentase sebesar 60.51 %, indikator tata kelola dengan persentase sebesar 72.84 % dan indikator output dengan persentase sebesar 56.25 %. Satu indikator didominasi oleh pendekatan liberalisme yaitu indikator sumber anggaran dengan persentase sebesar 94.02 %. Akan tetapi, analisis isi pada bab ini belum berhenti pada analisis kelima indikator tersebut. Masih diperlukannya suatu hasil nilai rata-rata

untuk membuktikan dan menentukan hipotesis yang telah disusun di dalam Bab I. Maka dari itu, diperlukannya hasil akumulatif indikator untuk menentukan satu dari tiga pendekatan mana yang paling dominan di dalam regulasi dan kebijakan tentang penanganan Migrasi ilegal di Malaysia. Berikut merupakan tabel hasil akumulatif seluruh indikator di bawah ini.

Tabel 4.6 Hasil akumulatif analisis isi seluruh indikator dalam manajemen kebijakan penanganan migrasi ilegal

No.	Indikator	Pendekatan (%)		
		Realisme	Liberalisme	Konstruktivisme
1.	Aktor	1.696 (96.63%)	25 (1.42%)	34 (1.93%)
2.	Otoritas	1.417 (60.51%)	799 (34.14%)	125 (5.34%)
3.	Sumber anggaran	3 (3.75%)	126 (94.02%)	2 (1.49%)
4.	Tata kelola	641 (72.84%)	146 (16.59%)	93 (10.56%)
5.	Output	54 (56.25%)	12 (12.5%)	30 (31.25%)
TOTAL		3.811 (73.24%)	1.108 (21.29%)	284 (5.45%)
TOTAL		5.203 (100%)		

Diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan hasil dari tabel diatas, pendekatan dengan persentase terkecil yaitu pendekatan konstruktivisme sebesar 5.45 % dengan jumlah frekuensi 284, pendekatan dengan persentase terbesar kedua yaitu pendekatan liberalisme sebesar 21.29 % dengan jumlah frekuensi 1.108 dan pendekatan dengan persentase terbesar yaitu pendekatan realisme sebesar 73.24 % dengan jumlah frekuensi 3.811. Jadi, berdasarkan dari

hasil kesimpulan tabel tersebut, konstruksi kebijakan tentang penanganan Migrasi ilegal di Malaysia menggunakan pendekatan realisme.

Pendekatan realisme dalam kebijakan penanganan Migrasi ilegal di Malaysia dapat dilihat dalam bentuk bentuk penggunaan hukuman yang bersifat koersif yang secara luas digunakan kepada imigran ilegal yang tertangkap. Bentuk hukuman yang paling umum digunakan adalah denda, hukuman penjara atau detensi, cambuk dan deportasi. Pemberian hukuman tersebut bergantung kepada jenis pelanggaran yang dilakukan oleh imigran ilegal tersebut (Kanapathy, 2010; Choo & Mokhtar, 2017; Kudo, 2013; Ramayal, 2013).

Undang-Undang Imigrasi 1959/63, UU yang menjadi basis utama dalam kebijakan Migrasi di Malaysia, telah diamandemen sebanyak lima kali untuk mengurangi jumlah dan dampak imigran ilegal yang terus semakin meningkat. Amandemen pada tahun 1971 memperkenalkan hukuman tidak hanya kepada imigran ilegal, tetapi pihak-pihak yang ikut terlibat di dalam Migrasi ilegal tersebut, yaitu mulai dari perusahaan tempat kerja, agen perekrutan, pemilik transportasi, agen penyelundupan dan petugas serta pejabat yang korup. Amandemen pada tahun 1997 dan 2002 kemudian diberlakukan untuk memberikan hukuman yang lebih berat kepada imigran ilegal dan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Selain bentuk hukuman tersebut, penjagaan kawasan dan razia merupakan kebijakan yang telah dari dulu dilaksanakan dalam penanganan imigran ilegal yang bersifat koersif (Kassim & Haji Mat Zin, 2011; Kanapathy, 2008).

Pelaksanaan kebijakan Migrasi ilegal di Malaysia hampir seluruhnya berada dalam kuasa negara, dalam hal ini pemerintah federal Malaysia. Tiga aktor utama dalam sistem Migrasi Malaysia adalah Komite Kabinet untuk Pekerja Asing dan Imigran Ilegal (JKKPA / PATI),

Kementerian Sumber Daya Manusia (MOHR), dan Kementerian Dalam Negeri (MOHA). Ketiga institusi pemerintahan tersebut berada di level federal. Untuk negara bagian Sabah dan Sarawak, khusus kebijakan penanganan imigran ilegal, pelaksanaannya dilaksanakan oleh petugas dan pejabat yang merupakan bagian dari tiga institusi pemerintahan tersebut (Muñoz Moreno, et al., 2015).

Hal ini kemudian yang menjadi dasar mengapa kebijakan penanganan Migrasi ilegal di Malaysia menggunakan pendekatan realisme dari awal pembentukan Malaysia selain daripada hasil analisis isi dari tujuh regulasi tersebut. Hasil amandemen dari ketujuh regulasi tersebut menunjukkan semakin koersifnya bentuk hukuman dan kuatnya pengawasan oleh negara dalam pelaksanaan kebijakan Migrasi ilegal. Pendekatan realisme kemudian menjadi cara yang dipakai dalam pemerintah untuk mengaplikasikan isi dari regulasi penanganan imigran ilegal, dalam konteks ini, mulai dari periode 2009 hingga 2018. Oleh karena itu, jika kedepannya ditemukan kebijakan yang tidak menggunakan pendekatan realisme (dengan catatan unsur-unsur liberalisme dan konstruktivisme masih diperbolehkan, karena seperempat dari hasil analisis isi regulasi merupakan pendekatan liberalisme dan konstruktivisme), maka perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali isi dari kebijakan tersebut.